

**DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN  
PUTUSAN PERKARA PERCERAIAN  
(Studi Kasus Putusan Nomor Register Perkara 1055/Pdt.G/2009/PA. Kra di  
Pengadilan Agama Karanganyar)**



Penulisan Hukum  
(Skripsi)

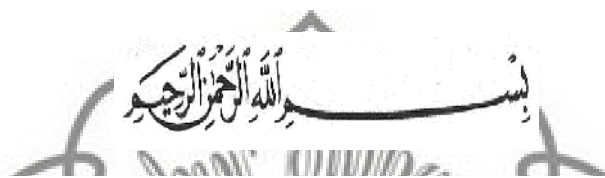
**Disusun dan Diajukan untuk  
Melengkapi Sebagian Persyaratan guna Memperoleh Derajat Sarjana S1  
dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret  
Surakarta**

Oleh

**WIWIN SURYANI**

**NIM : E 000 6041**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA  
2010**



Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih  
Dan Penyayang



## **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

### **Penulisan Hukum (Skripsi)**

**DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN  
PERKARA PERCERAIAN**  
(Studi Kasus Putusan Nomor Register Perkara 1055/Pdt.G/2009/PA. Kra di  
Pengadilan Agama Karanganyar)

**Oleh**  
**Wiwin Suryani**  
**NIM. E0006041**

**Disetujui untuk dipertahankan dihadapan Dewan Penguji Penulisan Hukum  
(Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta**

**Surakarta, Oktober 2010**

**Dosen Pembimbing**

**SOEHARTONO, S.H.M.HUM**

**NIP. 195604251985031002**

**PENGESAHAN PENGUJI****Penulisan Hukum (Skripsi)****DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN  
PERKARA PERCERAIAN**

(Studi Kasus Putusan Nomor Register Perkara 1055/Pdt.G/2009/PA. Kra di  
Pengadilan Agama Karanganyar)

Oleh

**Wiwin Suryani**

**NIM. E0006041**

**Telah diterima dan dipertahankan di hadapan**

**Dewan Penguji Penulisan Hukum (Skripsi)**

**Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta**

Pada :

Hari : Selasa

Tanggal : 26 Oktober 2010

**DEWAN PENGUJI**

1. **Hariono, S.H., M.H** : .....  
Ketua
2. **Syafrudin Yudo Wibowo, S.H, M.H** : .....  
Sekretaris
3. **Soehartono, S.H., M.Hum** : .....  
Anggota

**Mengetahui**

**Dekan,**

**Mohammad Jamin, S.H., M.Hum**

**NIP.19610930 198601 1001**

**PERNYATAAN**

Nama : Wiwin Suryani

NIM : E0006041

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan hukum (skripsi) berjudul :

**DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN  
PUTUSAN PERKARA PERCERAIAN (Studi Kasus Putusan Nomor  
Register Perkara 1055/Pdt.G/2009/PA. Kra di Pengadilan Agama  
Karanganyar)** adalah betul-betul karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya  
dalam penulisan hukum (skripsi) ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam  
daftar pustaka. Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar,  
maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan penulisan  
hukum (skripsi) dan gelar yang saya peroleh dari penulisan hukum (skripsi) ini.

Surakarta, Oktober 2010

Yang membuat pernyataan

Wiwin Suryani

NIM E0006041

## ABSTRAK

**Wiwin Suryani, E 0006041. 2010. DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN PERKARA PERCERAIAN (Studi Kasus Putusan Nomor Register Perkara 1055/Pdt.G/2009/PA. Kra di Pengadilan Agama Karanganyar). Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan perkara perceraian dengan menganalisa putusan hakim Pengadilan Agama Karanganyar Nomor Register Perkara 1055/Pdt.G/2009/PA.Kra yang didalam alasan putusan tersebut memuat alasan perceraian salah satu pihak pergi meninggalkan tempat kediaman tanpa diketahui alamatnya (*gaib*).

Penelitian ini merupakan penelitian normatif bersifat deskriptif. Jenis data yang digunakan yaitu data sekunder. Sumber data sekunder yang digunakan mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik Pengumpulan data yang digunakan yaitu studi kepustakaan. Analisis data yang dilaksanakan menggunakan cara menginventarisasi sekaligus mengkaji penelitian dari studi kepustakaan, aturan perundang-undangan beserta dokumen-dokumen yang dapat membantu menafsirkan norma untuk menjawab permasalahan yang diteliti.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan penulis terhadap putusan nomor 1055/Pdt.G/2009/PA.Kra, dapat diambil kesimpulan kesatu bahwa, Pertimbangan hakim terhadap putusan perkara perceraian nomor 1055/Pdt.G/2009/PA.Kra dengan alasan perceraian salah satu pihak pergi meninggalkan tempat kediaman tanpa diketahui alamatnya (*gaib*) telah memenuhi unsur perceraian yang terdapat dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975. Meskipun dalam implementasinya, dalam Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tidak memuat tentang pihak yang meninggalkan tempat kediaman tanpa diketahui alamatnya. Pengadilan dalam perkara perceraian ini memutus *verstek* karena ketidakhadiran tergugat. Setiap putusan *verstek* dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Karanganyar, selalu diperlukan proses pembuktian. Hal ini disamping untuk mengetahui dalil gugatannya juga untuk mengetahui apakah gugatan tersebut berdasarkan hukum dan berlawanan hukum atau tidak..Kedua, Hambatan hakim Pengadilan Agama Karanganyar dalam memutus perkara perceraian dengan alasan salah satu pihak pergi meninggalkan tempat kediaman tanpa diketahui alamatnya adalah panggilan yang dilakukan melalui mass-media memerlukan waktu yang lama, dan kurang efektif karena pemanggilan perkara perceraian diatas hanya dilakukan dengan memanggil tergugat melalui mass-media lokal dan menempelkan relaas panggilan di Pengadilan Agama Karanganyar, sehingga dimungkinkan tergugat tidak mengetahui panggilan tersebut, karena bisa saja tergugat tengah berada di luar kota atau bahkan di luar negeri, sehingga panggilan tersebut tidak menjangkau keberadaan tergugat.

Kata kunci : Pertimbangan Hakim, Putusan, Perceraian

## ABSTRACT

**Wiwin Suryani, E 0006041. 2010. THE JUDGE'S RATIONALE IN DECIDING THE DIVORCE CASE (A CASE STUDY ON VERDICT NUMBER 1055/PDT.G/2009/PA. Kra in Karanganyar Religion Court). Law Faculty of Sebelas Maret University.**

The objective of research is to find out the judge's rationale in deciding the divorce case by analyzing the decision of Karanganyar Religion Court's Judge Number 1055/PDT.G/2009/PA.Kra one reason of which contains divorce because one party leaves from home with unknown address.

This study belongs to a descriptive normative research. The data type employer was primary one. The secondary data source used included the primary, secondary and tertiary law materials. Technique of collecting data used was library study. The data analysis was done using inventorying and studying the research from library study, legislation, as well as document that can help interpreting the norm to answer the problems studied.

Based on the result of research conducted on the decision number 1055/PDT.G/2009/PA.Kra, it can be concluded as follows: firstly, the judge's rationale in the decision of divorce case number 1055/PDT.G/2009/PA.Kra, with one party leaving home without unknown address as the reason of divorce has met the divorce element mentioned in the Article 116 of Islamic Law Compilation and Article 19 of Governmental Regulation Number 9 of 1975. Although in the implementation, the Islamic Law Compilation and Governmental Regulation Number 9 of 1975 do not mention the party leaving home without unknown address, the court decides this divorce case as *verstek* because the absence of the accused. Every *verstek* verdict in the divorce case in Karanganya Religion Court always requires the authentication process. It, in addition to find out the proposition of accusation, is also intended to find out whether or not the accusation is based on the law. Secondly, the obstacle the Judge of Karanganyar Religion Cour encounters in deciding the divorce case with the reason of one party leaves home with unknown address is that the call via mass media takes long time and is less effective because the divorce case calling is only done by calling the accused through the local mass-media and posting the calling release in the Karanganyar Religion Court, so that the accused perhaps does not know such calling, because he/she might be outside of town or overseas, so that the calling cannot reach the existence of the accused.

Keywords: Judge's deliberation. Decision, Divorce.

## MOTTO

“Semua berawal dari tekad, kerja keras, dan keyakinan bahwa “aku bisa” merengkuh suatu hal. Namun di balik semua itu, tersimpan kekhawatiran. Biarlah berlalu kekhawatiran itu bersama keyakinan kita”

( Wiwin Suryani )

“Biarkan keyakinan kamu 5 cm menggantung mengambang didepan kening kamu. Dan sehabis itu yang kamu perlu adalah kaki yang berjalan lebih jauh dari biasanya, tangan yang akan berbuat lebih banyak dari biasanya, mata yang akan menatap lebih lama dari biasanya, leher yang akan lebih sering melihat ke atas, lapisan tekad yang seribu kali lebih keras dari baja dan hati yang akan bekerja lebih keras dari biasanya, serta mulut yang akan selalu berdoa.”

( Donny Dirgantoro )

“A life without a risk is a life unlived.”





## PERSEMBAHAN

Penulisan hukum ( skripsi ) ini Penulis persembahkan untuk :

- ☞ Allah SWT, Pemilik Semesta Raya, yang senantiasa memberikan kejutan yang menakjubkan dalam kehidupan;
- ☞ Keluarga kecil tercinta yang telah mengasihi dan menyertai selama ini;
- ☞ Ayah dan ibuku, seorang yang penyabar dan tak pernah ada keluhan kesah.....Seorang ksatria, LuV U Mom & Dad!!!
- ☞ Adikku tersayang, terima kasih atas segalanya...hanya kamu adik yang bisa selalu mengalah buat aku;
- ☞ Sahabatku Padmawati, seorang sahabat yang selalu ada buat aku, atas keluhan kesahku dan atas kebahagiaanku;
- ☞ My very special love, "cahaya", malaikat dikala aku rapuh, pelindung kala aku lemah, pecinta yang abadi;
- ☞ Almamater Fakultas Hukum UNS.

## KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah, penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayahNya maka penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN PERKARA PERCERAIAN (Studi Kasus Putusan Nomor Register Perkara 1055/Pdt.G/2009/PA. Kra di Pengadilan Agama Karanganyar) dengan baik dan lancar. Sholawat serta salam semoga tercurah selalu kepada Rasulullah SAW, keluarga, para sahabat, dan seluruh pengikutnya terkasih hingga suatu hari yang telah Allah SWT janjikan.

Penulisan hukum ini disusun dan diajukan guna melengkapi syarat-syarat guna memperoleh derajat sarjana dalam ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. Penulis menyadari bahwa skripsi ini kurang dari sempurna, mengingat segala keterbatasan yang ada pada penulis, oleh karena itu penulis akan menerima dengan senang hati segala kritik dan saran demi kesempurnaan skripsi ini. Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak, baik secara moral maupun materiil, oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Moh. Jamin, S.H, M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
2. Bapak Edi Herdiyanto, S.H.,M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Acara.
3. Bapak Soehartono, S.H,M.Hum., selaku Pembimbing yang telah meluangkan waktu, pikiran dan tenaga yang dengan sabar memberikan saran dan bimbingan sehingga terselesaikannya skripsi ini.
4. Bapak Dr. Hari Purwadi, S.H.,M.H., selaku Pembimbing Akademik yang telah membimbing dan mengarahkan penulis selama masa studi.
5. Segenap Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan selama penulis menempuh studi.

6. Segenap Bapak dan Ibu Karyawan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah memberikan pelayanan dalam bidang akademik kepada penulis selama masa studi.
7. Bapak Ahmad Akhsin, selaku Ketua Pengadilan Agama Karanganyar.
8. Ibu Tri, Ibu Umi, Ibu Hani, Mas Anang, Mas Fadlan, Mas Gunawan, Bapak/Ibu Hakim Pengadilan Agama karanganyar dan seluruh staff dan karyawan Pengadilan Agama Karanganyar terima kasih untuk semua informasi dan bantuannya.
9. Kedua orang tua penulis yang telah memberikan bimbingan, kasih sayang dan doa yang selalu mengiringi penulis..
10. Buat Adikku tersayang Andri Atmoko terima kasih buat doa, dan semangatnya.
11. Buat teman-temanku kuliah Padmawati, Indy Mutiara R, Heppy Indah Alamsari, Picta Dody Putranto, Wahyu Dody, Murti P, Syafriel H, Reny Cahya M, Aditya F, Bagus Wisnu terima kasih buat semangat dan bantuannya selama ini.
12. Teman – teman angkatan 2006 Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.
13. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu-persatu disini yang telah membantu penulis hingga terselesaikannya skripsi ini.

Penulis berharap semoga skripsi ini banyak memberikan manfaat dan dapat berguna untuk melengkapi pengetahuan kita khususnya pengetahuan hukum.

Surakarta, Oktober 2010

Penulis,

Wiwin Suryani

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI .....	iv
HALAMAN PERNYATAAN .....	v
ABSTRAK .....	vi
ABSTRACT .....	vii
MOTO.....	viii
PERSEMBAHAN.....	ix
KATA PENGANTAR .....	x
DAFTAR ISI .....	xii
DAFTAR BAGAN.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
 <b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	 1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Manfaat Penelitian .....	5
E. Metode Penelitian .....	6
F. Sistematika Penulisan Hukum.....	13
 <b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	 15
A. Kerangka Teori .....	15
1. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan.....	15
a. Pengertian Perkawinan.....	15
b. Tujuan Perkawinan .....	17
2. Tinjauan Perceraian.....	18
a. Pengertian Perceraian.....	18
b. Bentuk-Bentuk Perceraian Menurut Hukum Islam....	19
c. Alasan-Alasan Perceraian .....	28

3. Tinjauan Umum Tentang Peradilan Agama .....	35
a. Peradilan Agama dan Kewenangan Peradilan Agama .....	35
4. Tinjauan Umum Tentang Putusan Pengadilan Agama....	38
a. Definisi Putusan.....	38
b. Bentuk dan macam putusan Pengadilan Agama.....	39
c. Kekuatan putusan Pengadilan Agama.....	41
B. Kerangka Pemikiran .....	44
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>47</b>
A. Hasil Penelitian . .....	47
B. Pembahasan .. .....	47
1. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan perceraian.....	47
2. Hambatan hakim Pengadilan Agama Karanganyar dalam menjatuhkan putusan perkara perceraian dengan alasan salah satu pihak pergi meninggalkan tempat kediaman tanpa diketahui alamatnya ( <i>gaib</i> ) .....	65
<b>BAB IV SIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>69</b>
A. Simpulan .....	69
B. Saran .....	70

## DAFTAR PUSTAKA

## LAMPIRAN

**DAFTAR BAGAN**

Gambar 1. Kerangka pemikiran.....	46
-----------------------------------	----



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran : Salinan Putusan Nomor : 1055/Pdt.G/2009/PA.Kra





## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan antara dua manusia mempunyai kedudukan yang sangat penting. Perkawinan bukan hanya sekedar suatu upacara adat, tetapi juga suatu pencatatan status perkawinan oleh aparaturnya. Menurut Ahmad Azhar Basyir, dengan jalan perkawinan yang sah, pergaulan laki-laki dan perempuan terjadi secara terhormat sesuai kedudukan manusia sebagai makhluk yang berkehormatan. Pergaulan hidup rumah tangga dibina dalam suasana damai, tentram, dan rasa kasih sayang antara suami dan istri. Anak keturunan dari hasil perkawinan yang sah menghiasi kehidupan keluarga dan sekaligus merupakan kelangsungan hidup manusia secara bersih dan berkehormatan. Perkawinan bukan hanya sebagai sarana untuk menyalurkan nafsu biologis semata seperti pada binatang, tetapi mempunyai makna yang lebih luas dan mendalam, yaitu menciptakan kehidupan keluarga yang aman dan tentram (*sakinah*), pergaulan yang saling mencintai (*mawaddah*) dan saling menyantuni (*rahmah*) (Ahmad Azhar Basyir, 2000: 1).

Perkawinan dan perceraian merupakan suatu hal yang sangat urgen dalam kehidupan manusia, itu sebabnya hukum Islam menaruh perhatian yang cukup signifikan terhadap kedua hal tersebut. Hal ini bisa terlihat apabila kita mengkaji hukum Islam. Perceraian tidak bisa dipisahkan dari perkawinan, tak ada perceraian tanpa diawali perkawinan. Perkawinan adalah suatu ikatan lahir dan bathin antara seorang laki-laki dan seorang wanita untuk membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah warahmah*. Namun pada saat tujuan itu tidak tercapai, maka perceraian merupakan jalan keluar (*way out*) terakhir yang mesti ditempuh. Perceraian tidak dapat dilakukan kecuali telah ada alasan-alasan yang dibenarkan oleh agama dan undang-undang. Menurut Mohd. Idris Ramulya pada prinsipnya suatu perkawinan itu ditujukan untuk selama hidup dan kebahagiaan yang kekal (abadi) bagi pasangan suami istri yang bersangkutan. Keluarga yang kekal dan bahagia itulah yang dituju (Mohd. Idris Ramulya, 1996:98)

Dari hal yang telah dikemukakan tersebut maka tak dapat dipungkiri bahwa kehidupan rumah tangga tak luput dari permasalahan-permasalahan yang timbul baik disengaja maupun tidak disengaja yang mana dapat menimbulkan permasalahan keluarga. Perselisihan-perselisihan yang terjadi harus dapat diselesaikan secara proporsional. Artinya bahwa apabila penyebab dari perselisihan tersebut adalah perkara kecil yang tidak disengaja oleh salah satu pihak, harus diselesaikan secara damai, tidak perlu diselesaikan melalui jalur hukum.

Perselisihan yang menjurus kearah perceraian harus dihindarkan semaksimal mungkin, karena pada prinsipnya Undang-Undang Perkawinan di Indonesia menganut ketentuan mempersulit terjadinya perceraian. Kalaupun terjadi perceraian, hal tersebut merupakan jalan akhir yang akan ditempuh apabila memang perkawinan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi. Perkawinan dapat diputus karena alasan-alasan yang prinsipil, yang apabila rumah tangganya dipertahankan akan terjadi kemadharatan dan dampak buruk yang lebih besar daripada dampak positifnya. Atau dengan kata lain, bercerai akan lebih besar manfaatnya daripada tetap menjalin hubungan rumah tangga.

Putusnya hubungan perkawinan dapat terjadi karena (Mohd. Idris Ramulya, 1996:152-153):

- 1) Perkawinan dapat putus karena:
  - (1) kematian;
  - (2) perceraian, dan
  - (3) atas putusan pengadilan (Pasal 113 Kompilasi Hukum Islam)
- 2) Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian.

- 3) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang, Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- (a) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- (b) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- (c) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- (d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- (e) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri;
- (f) Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- (g) Suami melanggar taklik talak;
- (h) Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Dari alasan perceraian diatas, tampak suatu alasan perceraian karena salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau hal lain diluar kemampuannya. Dalam hal ini, penulis akan mengemukakan alasan perceraian jika salah satu pihak pergi

meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun atau bahkan lebih dan tempat kediaman sekarang tidak diketahui yang terjadi pada kasus di Pengadilan Agama Karanganyar dengan Nomor Register Perkara 1055/Pdt.G/2009/PA.Kra dan diputus cerai oleh Hakim Pengadilan Agama Karanganyar.

Berdasarkan uraian tersebut maka penulis tertarik untuk mengetahui dan melakukan penelitian mengenai dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan cerai dengan alasan salah satu pihak pergi meninggalkan tempat kediaman tanpa diketahui alamatnya didalam bentuk sebuah penulisan hukum dengan judul:

“ DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN PERKARA PERCERAIAN (Studi Kasus Putusan Nomor Register Perkara 1055/Pdt.G/2009/PA.Kra) ”.

## **B. Perumusan Masalah**

Untuk lebih memperjelas agar permasalahan yang ada nanti dapat dibahas dengan lebih terarah dan sesuai dengan sasaran yang diharapkan, maka penting sekali bagi penulis untuk merumuskan permasalahan yang akan dibahas.

Adapun perumusan masalah dalam penelitian yang dirumuskan penulis adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan perkara perceraian (Studi Kasus Putusan Nomor Register Perkara 1055/Pdt.G/2009/PA.Kra)?
2. Apakah hambatan Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar dalam menjatuhkan putusan perkara perceraian dengan alasan salah satu pihak pergi meninggalkan tempat kediaman tanpa diketahui alamatnya (Studi Kasus Putusan Nomor Register Perkara 1055/Pdt.G/2009/PA.Kra)?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian diperlukan karena terkait erat dengan peerumusan masalah dan judul penelitian dari penelitian itu sendiri. Oleh karena itu penulis mempunyai tujuan atau hal-hal yang ingin dicapai melalui penelitian ini. Tujuan yang ingin dicapai oleh penulis sendiri baik berupa tujuan obyektif maupun tujuan secara subyektif. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

#### 1. Tujuan obyektif

Mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan perkara perceraian hambatan hakim Pengadilan Agama Karanganyar dalam menjatuhkan putusan perkara perceraian dengan alasan salah satu pihak pergi meninggalkan tempat kediaman tanpa diketahui alamatnya (*gaib*).

#### 2. Tujuan Subyektif

- a. Untuk memperdalam dan menambah pengetahuan penulis dalam hal pelaksanaan hukum acara di Pengadilan Agama dalam menyelesaikan perkara perceraian dengan alasan salah satu pihak pergi meninggalkan tempat kediaman tanpa diketahui alamatnya (*gaib*).
- b. Untuk melengkapi syarat-syarat guna memperoleh derajat Sarjana dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

### D. Manfaat Penelitian

Penulis berharap bahwa kegiatan penelitian dalam penulisan hukum ini akan bermanfaat bagi penulis maupun orang lain. Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penulisan hukum ini antara lain:

#### 1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum pada umumnya dan Hukum Acara Peradilan Agama pada khususnya.
  - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya referensi dan literature dalam dunia kepustakaan di bidang Hukum Perdata khususnya Hukum Perkawinan dan Hukum Acara Peradilan Agama.
  - c. Hasil penelitian ini dapat dipakai sebagai acuan terhadap penulisan maupun penelitian sejenis untuk tahap berikutnya.
2. Manfaat Praktis
- a. Guna mengembangkan penalaran ilmiah dan wacana keilmuan penulis serta untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu hukum yang diperoleh melalui bangku perkuliahan.
  - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan serta tambahan pengetahuan bagi semua pihak yang bersedia menerima dan bagi para pihak yang terkait dalam masalah yang diteliti serta bermanfaat bagi para pihak yang berminat pada permasalahan yang sama.

## E. Metode Penelitian

Sebelum menguraikan tentang metode penelitian, terlebih dahulu akan dikemukakan mengenai pengertian metode itu sendiri. Kata “metode” (Inggris: *Method*, Latin: *methodus*, Yunani: *Methodus-meta* berarti sesudah, diatas, sedangkan hodos berarti suatu jalan atau suatu cara). Dua syarat utama yang harus dipenuhi sebelum mengadakan penelitian ilmiah dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan yaitu peneliti harus terlebih dahulu memahami konsep dasar ilmu pengetahuan (yang berisi sistem dan ilmunya) dan metodologi penelitian disiplin ilmu tersebut (Johnny Ibrahim, 2006:26)

Metode dan sistem membentuk hakikat ilmu. Sistem berarti keseluruhan peraturan pengetahuan yang teratur atau totalitas isi dari ilmu, sementara itu metode secara harafiah menggambarkan jalan atau cara totalitas ilmu tersebut dicapai dan dibangun. (Johnny Ibrahim, 2006:27). Metodologi penelitian merupakan cara-cara mengenai bagaimana suatu penelitian itu akan dilakukan dengan cara-cara tertentu yang dibenarkan, baik mengenai tata cara pengumpulan data, maupun analisis data serta laporan penelitian.

Adapun metode yang digunakan penulis dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

#### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau doktrinal. Adapun yang dimaksud metode penelitian hukum normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya (Johnny Ibrahim, 2005:57). Sedangkan Peter Mahmud Marzuki mendefinisikan penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi (Peter Mahmud Marzuki, 2009:35.)

Penelitian seperti itu tidak mengenal penelitian lapangan (*field research*) karena yang diteliti adalah bahan-bahan hukum sehingga dapat dikatakan sebagai: *library based, focusing on reading and analysis of the primary and secondary materials* (Jonny Ibrahim, 2006 :46)

#### 2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian dari penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan, atau gejala-gejala lainnya (Soerjono Soekanto, 2007:10).

Dalam penelitian ini penulis ingin menjelaskan mengenai dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan perkara perceraian di Pengadilan Agama Karanganyar.

### 3. Pendekatan Penelitian

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Pendekatan-pendekatan yang dapat digunakan dalam penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) (Peter Mahmud Marzuki, 2009: 93). Adapun dalam penelitian ini penulis hanya menggunakan beberapa pendekatan yang relevan dengan permasalahan yang dihadapi, diantaranya adalah;

#### a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*),

Suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral (Johnny Ibrahim, 2005:302). Menurut Peter Mahmud Marzuki dalam bukunya Metode Penelitian Hukum menjelaskan bahwa pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani (Peter Mahmud Marzuki, 2009 : 93).

#### b. Pendekatan kasus (*case approach*),

Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan



yang tetap (Peter Mahmud Marzuki, 2009 : 94). Dalam pendekatan ini, maka kasus hanya digunakan sebagai referensi bagi suatu isu hukum yang ada, dalam penelitian ini adalah kasus perceraian dengan alasan salah satu pihak pergi meninggalkan tempat kediaman.

#### 4. Lokasi Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan oleh penulis merupakan jenis penelitian hukum normatif, sehingga tidak memerlukan data lapangan secara langsung, melainkan data-data tersebut dapat diperoleh melalui studi kepustakaan. Lokasi penelitian yang dipilih oleh penulis adalah sebagai berikut:

- a. Pengadilan Agama Karanganyar. Pengambilan lokasi tersebut dikarenakan di Pengadilan Agama Karanganyar terdapat kasus perceraian dengan alasan salah satu pihak pergi meninggalkan tempat kediaman tanpa diketahui alamatnya.
- b. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- c. Perpustakaan Pusat Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- d. Tempat-tempat lain yang tersedia data yang diperlukan.
- e. Media Massa.

#### 5. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder, meliputi data yang diperoleh dengan cara penelitian kepustakaan/melalui literatur-literatur ,himpunan peraturan perundang-undangan yang berlaku, hasil penelitian

yang berwujud laporan, maupun bentuk-bentuk lain yang berkaitan dengan penelitian.

Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif yang artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Sedangkan bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan (Peter Mahmud Marzuki, 2005:141)

Sumber data sekunder dalam penelitian normatif ini adalah:

a. Bahan Hukum Primer

- 1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- 3) Kompilasi hukum Islam.
- 4) Putusan Pengadilan Agama Karanganyar Nomor register Perkara 1055/Pdt.G/2009/PA

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder sebagai pendukung dari data sekunder dari bahan hukum primer yang akan digunakan dalam penelitian ini meliputi peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen-dokumen, makalah, skripsi, media massa, dan lain-lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

c. Bahan Hukum Tersier

Merupakan bahan hukum yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan lain-lain.

6. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan penulis untuk mendapatkan data yang diperlukan adalah studi kepustakaan. Studi kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data dengan menggunakan buku-buku, literatur, perundang-undangan, dokumen-dokumen serta sumber tertulis lainnya guna memperoleh bahan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

7. Teknik Analisis

Mengingat jenis penelitian ini adalah normatif, maka teknik analisis yang penulis gunakan adalah dengan metode silogisme dan interpretasi, dengan menggunakan pola berfikir deduktif serta suatu tinjauan yuridis yang bersifat logis dan sistematis. Yuridis yaitu suatu tinjauan yang disesuaikan dengan pemikiran penulis dan disusun dengan mencari hubungan antara pemikiran dan teori-teori yang telah diteliti yang semuanya itu dihubungkan dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

Interpretasi atau penafsiran merupakan salah satu metode penemuan hukum yang memberi penjelasan yang gamblang mengenai teks undang-undang agar ruang lingkup kaidah dapat ditetapkan sehubungan dengan peristiwa tertentu. Penafsiran oleh hakim merupakan penjelasan yang harus menuju kepada pelaksanaan yang dapat diterima oleh masyarakat mengenai peraturan hukum terhadap peristiwa konkrit. Metode interpretasi ini adalah sarana atau alat untuk mengetahui makna undang-undang (Sudikno Mertokusumo, 2003:169). Metode interpretasi yang digunakan

oleh penulis dalam penelitian ini merupakan penjabaran dari putusan-putusan hakim.

Menurut Sudikno Mertokusumo dalam bukunya yang berjudul mengenal hukum disebutkan bahwa dari pertimbangan-pertimbangan yang digunakan oleh hakim dalam menemukan suatu hukum dapat disimpulkan adanya metode interpretasi menurut bahasa (gramatikal), historis, sistematis, teleologis, perbandingan hukum dan futuristis.

Adapun metode interpretasi yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah;

1. Interpretasi sistematis

Terjadinya undang-undang selalu berkaitan dan berhubungan dengan peraturan perundang-undangan lain, dan tidak ada undang-undang yang berdiri sendiri lepas dari sama sekali dari keseluruhan perundang-undangan. Menafsirkan undang-undang sebagai bagian dari keseluruhan sistem perundang-undangan dengan jalan menghubungkan dengan undang-undang lain disebut interpretasi sistematis atau logis (Sudikno Mertokusumo, 2003 : 172).

2. Interpretasi historis

Interpretasi historis terdapat dua macam cara interpretasi yaitu penafsiran menurut sejarah undang-undang yaitu dengan hendak mencari maksud ketentuan undang-undang dan sejarah penafsiran hukum yaitu interpretasi yang hendak memahami undang-undang dalam konteks sejarah hukum.

3. Metode argumentasi

Argumentasi adalah metode penemuan hukum dalam hal peraturannya ada tetapi tidak jelas untuk dapat diterapkan pada peristiwanya (Sudikno Mertokusumo,2003:176).

## **F. Sistematika Penulisan Hukum**

Dalam Penulisan Hukum (Skripsi) ini terdapat empat bab yang masing-masing terdiri atas beberapa subbab sesuai pembahasab dan materi yang diteliti. Adapun sistematika penulisan hukum ini adalah sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini berisi kajian pustaka dan teori yang berkenaan dengan judul dan masalah yang akan diteliti meliputi :Tinjauan tentang Perkawinan, Tinjauan tentang Perceraia, Tinjauan tentang Peradilan Agama, Tinjauan tentang Putusan Pengadilan Agama. Selain itu untuk memudahkan pemahaman alur berpikir, maka di dalam bab ini juga disertai dengan Kerangka Pemikiran.

### **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini, penulis mencoba menyajikan pembahasan berdasarkan rumusan masalah yang telah disusun, yaitu mengenai

- a) Bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan perkara perceraian (Studi Kasus Putusan Nomor Register Perkara 1055/Pdt.G/2009/PA.Kra)?
- b) Apakah hambatan Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar dalam menjatuhkan putusan perkara perceraian dengan alasan salah satu pihak pergi meninggalkan tempat kediaman tanpa diketahui alamatnya (Studi Kasus Putusan Nomor Register Perkara 1055/Pdt.G/2009/PA.Kra)?

#### BAB IV      PENUTUP

Bab ini merupakan bagian akhir dari penulisan hukum ini. Pada bab ini akan disampaikan kesimpulan-kesimpulan dan saran dari hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan oleh penulis.

#### DAFTAR PUSTAKA

#### LAMPIRAN



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Kerangka Teori

#### 1 Tinjauan Umum Tentang Perkawinan

##### a. Pengertian Perkawinan

Langgengnya kehidupan perkawinan merupakan suatu tujuan yang diinginkan oleh Islam. Akad nikah diadakan adalah untuk selamanya dan seterusnya sampai meninggal dunia, agar suami istri dapat mewujudkan rumah tangga tempat berlindung, menikmati naungan kasih sayang dan dapat memelihara anak-anaknya yang hidup dalam pertumbuhan yang baik. Karena itulah dikatakan bahwa “ikatan antara suami istri” adalah ikatan paling suci dan kokoh. Dan tidak ada suatu dalil yang lebih jelas menunjukkan sifat kesuciannya yang sedemikian agung itu, lain daripada Allah sendiri, yang menanamkan ikatan perjanjian antara suami istri dengan “*mitsaqun-ghalizhum*” yang artinya adalah perjanjian yang kokoh (Sayyid Sabiq, 1980:7)

Hal tersebut dikuatkan pula dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan pula mengenai pengertian perkawinan, yang berbunyi: “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan suatu ibadah”.

Nikah dalam Islam adalah perjanjian suci bagi tiap-tiap orang Islam yang harus dilakukan, ia merupakan pertalian yang seteguh-teguhnya dalam hidup dan kehidupan manusia, bukan saja antara suami istrinya dan turunan bahkan antara dua keluarga, ia menjaga ketentraman jiwa dan mencegah perzinahan (Haji Abdullah Siddik, 1983:28)

Di Indonesia, masalah-masalah yang berkaitan dengan perkawinan telah diatur dalam beberapa peraturan-peraturan tertulis. Antara lain adalah Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang

Perkawinan. Dalam Undang-Undang tersebut dijelaskan mengenai rumusan mengenai pengertian perkawinan, yaitu dalam Pasal 1 yang berbunyi: “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk suatu keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan diatas, dapat ditarik beberapa unsur yakni (Muchlis Marwan, 1992:40):

- (a) Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita.
- (b) Keduanya terikat sebagai suami istri dan bukan terikat sebagai teman biasa.
- (c) Mempunyai tujuan yaitu membentuk suatu keluarga.
- (d) Sifat dari keluarga yang diharapkan yaitu keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera.

Pengertian perkawinan adalah suatu akad antara seorang calon mempelai pria dengan calon mempelai wanita atas dasar kerelaan dan kesukaan antara kedua belah pihak yang dilakukan oleh pihak lain (wali) menurut syarat yang telah ditetapkan syara' untuk menghalalkan percampuran antara keduanya, sehingga satu sama lain saling membutuhkan menjadi sekutu sebagai teman hidup dalam rumah tangga (Slamet Abidin dan Aminudin, 1999:10).

#### b. Tujuan Perkawinan

Menurut Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Kebahagiaan keluarga merupakan dambaan setiap orang, kebahagiaan tersebut tidak dapat diukur hanya dari segi materiil saja, akan tetapi segi materiil juga harus



dipenuhi. Kekal berarti abadi. Perkawinan yang terjadi diharapkan mampu bertahan sampai akhir hayat.

Tujuan Perkawinan menurut agama Islam, sesuai dengan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah adalah keluarga yang tentram, penuh kasih sayang dan penuh rahmat Allah SWT.

Sedangkan tujuan lain dari perkawinan adalah Perkawinan dalam Islam adalah untuk memenuhi kebutuhan hajat, tabiat kemanusiaan, dalam hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar rasa cinta kasih sayang, untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang diatur oleh syari'ah (Soemiyati, 1983:12).

Rumusan tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

- (a) Menghalalkan hubungan kelamin untuk memenuhi hajat tabiat manusia.

Allah menciptakan manusia dalam jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Kedua jenis tersebut mempunyai daya tarik yang merupakan tabiat kemanusiaan. Dengan adanya perkawinan, tabiat tersebut dapat disalurkan dengan halal.

- (b) Mewujudkan suatu keluarga dengan dasar cinta kasih.

Ikatan perkawinan adalah ikatan yang paling kokoh dibandingkan dengan ikatan lainnya dalam kehidupan bermasyarakat. Sedangkan alat untuk memperkokoh ikatan perkawinan adalah kasih sayang antara perempuan dan laki-laki secara timbal balik.

- (c) Memperkokoh keturunan yang sah.

Dengan adanya keturunan yang sah, maka pasangan laki-laki dan perempuan tersebut dapat memperoleh keturunan yang sah. Keinginan untuk memperoleh suatu keturunan adalah suatu hal yang wajar. Tentu saja orang tua mengharapkan keturunannya adalah anak yang shalih dan berbakti kepada kedua orang tuanya

## 2 Tinjauan Umum Tentang Perceraian

### a. Pengertian Perceraian

Dalam kehidupan rumah tangga, tak mungkin luput dari suatu permasalahan. Kadang kala permasalahan yang timbul dapat menjadi pemicu adanya perceraian. Perceraian merupakan bagian dari dinamika rumah tangga. Perceraian ada karena adanya perkawinan. Meskipun tujuan perkawinan bukanlah perceraian, perceraian merupakan sunnatullah dengan penyebab yang berbeda-beda (Beni Ahmad Saebani, M.Si., 2008:47)

Perceraian merupakan jalan terakhir yang ditempuh oleh suami istri karena ikatan perkawinan mereka tidak mungkin untuk dipertahankan lagi. Perceraian tidak hanya berdampak pada suami-istri saja, tetapi juga akan berdampak pada anak-anak dan keluarga dari kedua belah pihak. Alasan-alasan dilakukannya suatu perceraian haruslah alasan yang paling mendasar.

Divorce or dissolution of marriage is the termination of a marriage, canceling the legal duties and responsibilities of marriage and dissolving the bonds of matrimony between two persons. In most countries, divorce requires the sanction of a judge or other authority in a legal process to complete a divorce. A divorce does not declare a marriage null and void, as in an annulment, but divorce cancels the marital status of the parties, allowing them to marry another (<http://www.hg.org/divorce.html>).

Dalam Jurnal Internasional tersebut mengandung pengertian bahwa perceraian merupakan pemecahan masalah di dalam sebuah perkawinan

antara suami istri dan masalah perceraian haruslah diselesaikan di pengadilan yang berwenang menangani masalah tersebut.

b. Bentuk-Bentuk Perceraian Menurut Hukum Islam.

Dalam Hukum Islam, terdapat beberapa bentuk perceraian yakni:

(a) *Thalaq* atau talak

Artinya adalah melepaskan atau meninggalkan. Secara terminology, arti kata *Thalaq* atau talak adalah melepaskan ikatan perkawinan atau bubarnya hubungan perkawinan. Dalam pasal 117 Kompilasi Hukum Islam tertulis: “talak adalah ikrar suami dihadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan, dengan cara sebagaimana dimaksud dalam pasal 129, 130, 131.”

Hak talak hanya pada suami, sedangkan cerai gugat dimiliki oleh istri. Seorang istri berhak membayar kembali mahar yang telah diberikan oleh suaminya. Karena hak talak ada pada suami, maka suami harus berhati-hati dalam mengeluarkan kata-kata yang dapat berakibat jatuhnya talak. Kata-kata sindiran pun dapat menyebabkan jatuhnya talak jika diucapkan dengan niat menceraikan istrinya (Ahmad Saebani, M.Si., 2008:53)

*Thalaq* sebagai perbuatan hukum gampang menimbulkan akibat hukum putus perkawinan. Sehingga hak yang diletakkan pada pihak suami ini membutuhkan sifat kehati-hatian dalam arti suami tidak mudah melontarkan kata dan niatannya (Achmad Kuzari. M.A., 1995:118).

Suami yang berakal, baliq dan bebas memilih dialah yang boleh menjatuhkan talak dan talaknya dipandang sah. Akan tetapi ada talak-talak yang tidak sah, yakni (Sayyid Sabiq, 1980:18):

(1) Talak karena paksaan

Paksaan/terpaksa berarti bukan karena kehendak dan pilihannya sendiri. Kehendak dan pilihan merupakan dasar *taklif* (pembebanan agama). Jika kedua hal itu tidak ada maka *taklif* juga tidak ada dan orang yang terpaksa tidak bertanggungjawab atas segala tindakannya. Karena dia tidak punya kehendak, sehingga secara obyektif dia dipandang melakukan kemauan pemaksa.

(2) Talak karena mabuk

Jumhur ahli fiqh berpendapat bahwa talak karena mabuk hukumnya sah, karena kemauannya dia sendirilah sebab kerusakan akalnya.

Tetapi sebagian Ulama berpendapat main-main karena ucapannya tidak terpakai, sebab orang mabuk dan orang gila dipandang sama: kedua orang ini sama-sama kehilangan akal, sedangkali itulah sendi taklif.

(3) Talak ketika marah.

Kemarahan yang menyebabkan tidak teraturnya ucapan dan tidak menyadari apa yang dikatakannya, talaknya tidak sah karena kemauan sehatnya hilang.

(4) Talak main-main dan keliru

Jumhur ahli fiqh berpendapat, bahwa talak dengan main-main dipandang sah, sebagaimana dipandang sah nikah dengan main-main. Sebagian ahli ilmu berpendapat bahwa talak main-main tidak sah. Diantara mereka ini ialah: Al-Baqir, Shadiq dan Nashir. Demikian pula pendapat mazhab Ahmad bin Hambal dan Malik. Karena mereka ini mensyaratkan “sahnya talak” yang diucapkan dengan lisan, disadari artinya dan dikehendaki akibatnya secara sukarela.

Jika niat dan maksudnya tidak ada, maka dianggaplah sumpahnya (ucapannya) main-main.

Kehendak berarti yang diniatkan oleh orang untuk dikerjakan. Hal ini memerlukan kemauan yang pasti untuk melakukan yang dikendaki atau untuk meninggalkannya.

(5) Talak ketika lupa

Sama dengan hukumnya orang yang keliru dan main-main adalah talak ketika orang lupa.

Beda antara keliru dan main-main yaitu bahwa talak main-main oleh agama dan pengadilan dipandang sah, menurut golongan yang berpendapat demikian. Sedangkan talak karena kekeliruan ucapan hanya dipandang sah oleh pengadilan. Ini dikarenakan soal talak bukan merupakan obyek main-main.

(6) Talak karena tidak sadarkan diri

Orang yang tidak sadarkan diri yaitu orang yang tidak tahu lagi apa yang dikatakannya, karena suatu kejadian hebat menimpanya. Sehingga hilang akalnya dan berubah pikirannya. Maka talak orang yang seperti ini tidak sah, sebagaimana tidak sah talak orang yang gila, pikun, pingsan dan orang yang rusak akalnya karena tua atau sakit atau musibah yang tiba-tiba.

Talak juga dapat dilihat dari dua macam ketentuan, yaitu:

(1) *Talak Sunnah*

*Talak Sunnah* yaitu talak yang berjalan sesuai dengan ketentuan agama, yaitu seorang suami yang menalak istri yang telah digaulinya dengan sekali talak

dimasa bersih dan belum ia sentuh kembali selama masa bersih itu.

(2) *Talak Bid'i*

*Talak Bid'i* yaitu talak yang menyalahi ketentuan agama, misalnya talak yang diucapkan dengan tiga kali talak pada waktu yang bersamaan atau talak dengan ucapan tiga talak, atau menalak istri dalam keadaan sedang haid atau menalak istri dalam keadaan suci tetapi sebelumnya telah dicampuri.

Ditinjau dari berat ringannya akibat talak, talak dibagi menjadi dua jenis yakni:

(1) *Talak Raj'i*

*Talak Raj'i* adalah talak yang dijatuhkan suami kepada istri yang telah dicampuri, bukan talak karena tebusan, bukan pula talak yang ketiga kalinya. Suami secara langsung dapat kembali kepada istrinya yang dalam masa iddah tanpa harus melakukan akad nikah yang baru.

(2) *Talak Ba'in*

*Talak Ba'in* adalah talak yang tidak dapat dirujuk suami, kecuali dengan perkawinan baru walaupun dalam masa iddah. *Talak Ba'in* dibagi dalam dua macam yakni:

(a) *Ba'in Shugro*

Talak ini dapat memutus ikatan perkawinan. Artinya jika sudah terjadi talak, istri dianggap bebas menentukan pilihannya setelah habis masa iddah. Suami dapat rujuk dengan akad perkawinan baru.

(b) *Ba'in Kubra*

Suami tidak dapat rujuk dengan istrinya kecuali apabila istrinya telah menikah lagi dengan laki-laki lain dan bercerai kembali. Cara ini tidak boleh direkayasa.

**(b) *Khulu'***

*Khulu'* yang dibenarkan Hukum Islam tersebut bersal dari kata-kata *Khala'a ats-tsauba*, artinya : menanggalkan pakaian. *Khulu'* dinamakan juga tebusan. Karena istri menebus dirinya dari suaminya dengan mengembalikan apa yang diterimanya atau mahar kepada istrinya (Sayyid Sabiq, 1980:100)

*Khulu'* dapat berlangsung dengan persetujuan suami dan istri. Namun bila tidak tercapai persetujuan, maka Pengadilan Agama dapat menjatuhkan *Khulu'* pada suami. Apabila *Khulu'* itu dikehendaki suami tapi istri tidak menyetujuinya maka *Khulu'* tersebut tidak sah.

**(c) *Ta'liq Talak***

*Ta'liq talak* ialah suatu talak yang menggantungkan pada suatu hal yang mungkin terjadi, yang telah disebutkan dalam perjanjian terlebih dahulu (Soemiyati, 1974:115)

Di Indonesia perjanjian ini berupa perjanjian *Ta'liq talak* yang dibacakan suami setelah akad nikah. Adapun sighat *Ta'liq talak* yang tercantum dalam buku nikah yang diterbitkan Departemen Agama adalah sebagai berikut:

“Sewaktu-waktu saya:

- 1) Meninggalkan istri saya tersebut enam bulan berturut-turut.
- 2) Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya selama tiga bulan.
- 3) Atau saya membiarkan atau tidak memperdulikan saya enam bulan lamanya, kemudian istri saya tidak rela dan mengadakan

halnya kepada Pengadilan Agama atau petugas yang diberi hak untuk mengurus pengaduan itu dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh pengadilan atau petugas tersebut, dan istri saya membayar uang sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) sebagai '*iwadl* (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak satu saya kepadanya. Kepada pengadilan atau petugas tersebut, saya kuasakan untuk menerima uang '*iwadl* itu dan kemudian memberikannya untuk keperluan ibadah sosial”.

(d) ***Fasakh***

Kata *fasakh* berarti merusakkan atau membatalkan. Jadi, *fasakh* sebagai salah satu sebab putusnya perkawinan adalah merusakkan atau membatalkan hubungan perkawinan yang telah ada. *Fasakh* dapat terjadi karena beberapa hal-hal yang membatalkan akad nikah yang dilakukan dan dapat pula terjadi karena sesuatu hal yang baru dalam sesudah akad nikah (Ahmad Azhar Basyir, 1999:85).

Contoh *fasakh* karena syarat-syarat yang tidak terpenuhi dalam akad perkawinan (Sayyid Sabiq, 1980:133):

- (1) Setelah akad nikah ternyata istrinya adalah saudara sesusuan.
- (2) Suami-istri masih kecil diakadkan oleh selain ayah atau datuknya. Kemudian setelah dia dewasa maka dia berhak untuk meneruskan ikatan perkawinannya dahulu itu atau mengakhirinya. *Khiyar* ini disebut *Khiyar baliq*. Jika yang dipilih mengakhiri ikatan suami istri, maka hal ini disebut *fasakh akad*.

Contoh *fasakh* karena hal-hal mendatang karena akad nikah:

- (1) Bila salah seorang dari suami atau istri *murtad* dari Islam dan tidak mau kembali sama sekali. Maka akadnya *fasakh* (batal) disebabkan kemurtadan yang terjadi belakangan ini



- (2) Jika suami yang tadinya kafir masuk Islam, tetapi istri tetap dalam kekafirannya, yaitu tetap jadi musrik, maka akadnya batal (*fasakh*).

Apabila kondisi *fasakh* masih samar-samar maka diperlukan putusan pengadilan. *Fasakh* dengan putusan pengadilan dapat dimintakan dengan alasan-alasan sebagai berikut (Ahmad Azhar Basyir, 1999:85):

- (1) Suami atau istri sakit gila.
- (2) Suami atau istri menderita penyakit menular yang tidak dapat disembuhkan.
- (3) Suami atau istri tidak mampu atau kehilangan kemampuan untuk melakukan hubungan kelamin karena impoten atau terpotong kemaluannya.
- (4) Suami jatuh miskin hingga tidak mampu memenuhi kewajiban nafkah terhadap istri.
- (5) Istri merasa teripu, baik mengenai nasab keturunan, kekayaan atau kedudukan suami.
- (6) Suami *mafqud*, hilang tanpa berita dimana tempatnya dan apakah masih hidup atau telah meninggal dunia dalam waktu cukup lama (misalnya empat tahun).

(e) *Li'an*

Arti kata *Li'an* adalah sumpah laknat, yaitu sumpah yang didalamnya terdapat pernyataan bersedia menerima laknat Tuhan (KH Ahmad Azhar Basyir, 1999:87).

Akibat dari sumpah *li'an* suami itu ialah (Ahmad Azhar Basyir, 1999:88):

- (1) Suami terhindar dari hukuman menuduh zina.
- (2) Dilakukan hukuman zina terhadap istri.
- (3) Hubungan perkawinan putus.
- (4) Anak yang lahir tetap bukan anak suami, hanya bernazab kepada ibunya.
- (5) Istri menjadi haram selamanya terhadap suami, tidak dapat kembali hidup bersuami istri.

Sumpah *Li'an* dilakukan dengan cara suami mengucapkan sumpah empat kali. "Saya bersaksi kepada Allah dalam menuduh istri saya .....berbuat zina itu. Saya di pihak yang benar: dan anak yang dilahirkan itu adalah anak zina, bukan anak saya". Yang kelima setelah dinasehati oleh hakim suami mengatakan, "saya bersedia menerima laknat Allah apabila saya di pihak yang berdusta."

Pihak istri setelah suami menyatakan sumpah *Li'an* itu dapat terhindar dari hukuman zina apabila melakukan sumpah *Li'an* pula. Dalam hal ini istri mengucapkan sumpah empat kali. "saya bersaksi kepada Allah bahwa suamiku..... ini dalam menuduh saya berbuat zina, di pihak yang berdusta". Kemudian yang kelima setelah dinasehati oleh hakim, istri mengucapkan, "saya bersedia menerima murka Allah apabila suamiku di pihak yang benar" (KH Ahmad Azhar Basyir, 1999:87).

(f) *Ila'*

*Ila'* adalah sumpah untuk tidak mengumpuli istrinya selama empat bulan atau lebih dengan asma Allah, atau dengan salah satu sifat-sifat-Nya, atau dengan suatu ta'lik yang amat sukar terlaksana apabila suami mengumpuli istrinya (Ahmad Azhar Basyir, 1999:83)

Dalam keadaan semacam ini, istri tidak menentu kedudukannya, janda tidak, istripun juga tidak. Sehingga apabila setelah empat bulan sumpah tersebut diucapkan suami, maka suami harus memilih antara bercerai atau tetap meneruskan perkawinan. Apabila suami ingin tetap meneruskan perkawinan, maka ia wajib mencabut sumpahnya dan bertaubat kepada Allah.

(g) *Zhihar*

*Zhihar* dari kata *Zhahr* artinya punggung. Artinya adalah ucapan seorang suami untuk menjauhkan istrinya dengan ucapan “bagiku engkau seperti punggung ibuku”. *Zhihar* termasuk jenis perceraian yang dapat dirujuk. *Zhihar* menurut Djamil Latief adalah Suatu talak yang jatuh karena ucapan atau sumpah suami yang mempersamakan istrinya seperti “punggung ibunya” yang artinya suami tidak akan lagi mengumpulkan istrinya (Djamil Latief, 1985: 38).

*Zhihar* hanya boleh suami yang berakal sehat, dewasa lagi muslim yang perkawinannya dilakukan secara sah lagi dikuatkan menurut hukum.

(h) *Syiqaq*

Talak yang terjadi karena perselisihan suami istri, yang tidak dapat didamaikan oleh hakim yang ditunjuk dari pihak suami dan dari pihak istri (Djamil Latief, 1985: 38). *Syiqaq* dapat disebabkan oleh dua belah pihak suami dan istri. Dapat pula disebabkan oleh satu pihak saja.

Hakim mempunyai tugas untuk mendamaikan kedua belah pihak antara suami dan istri. Apabila memang hakim menganggap suami dan istri tersebut memang tidak dapat didamaikan, maka hakim boleh mengambil keputusan untuk menceraikan suami istri tersebut dengan dikuatkan oleh pengadilan.

c. Alasan – alasan perceraian

Overall, research suggests that family relationships and economic circumstances prior to and following divorce have considerable potential to influence child adjustment. Consequently, there are ample opportunities for intervention efforts that may offset some of these negative processes. (<http://family.jrank.org/pages/413/Divorce.html>)

Perceraian dapat terjadi karena banyak hal. Dalam jurnal internasional tersebut menjelaskan bahwa perceraian dapat terjadi karena hubungan keluarga yang tidak harmonis dan alasan ekonomi. Dalam hal ini, penulis akan menguraikan alasan-alasan perceraian menurut hukum Islam dan Hukum Positif yang berlaku di Indonesia.

**a) Alasan-Alasan Perceraian Menurut Hukum Islam**

Untuk perceraian dengan bentuk:

(1) Talak dengan alasan:

- (a) Istri tidak taat pada suami.
- (b) Istri berkelakuan buruk dan tidak dapat diubah.
- (c) Istri melanggar hukum ajaran Islam.
- (d) Istri tidak menjaga kehormatan dirinya, suami dan keluarga.

(2) *Khulu'* dengan alasan:

- (a) Istri tidak merasa sesuai lagi dengan suami.
- (b) Suami berkelakuan buruk.
- (c) Suami murtad.

(3) *Ta'liq talak* dengan alasan:

- (a) Suami meninggalkan istri selama enam bulan berturut-turut.

- (b) Suami tidak member nafkah wajib selama tiga bulan lamanya.
  - (c) Suami membiarkan atau tidak memperdulikan istrinya selama enam bulan.
- (4) *Fasakh* dengan alasan:
- (a) Suami atau istri mengidap penyakit gula.
  - (b) Suami atau istri berpenyakit menular atau tidak dapat diobati.
  - (c) Suami jatuh miskin.
  - (d) Suami atau istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami istri.
  - (e) Suami atau istri merasa tertipu dalam hal keturunan, kekayaan dan kedudukan.
  - (f) Adanya hal yang membatalkan akad nikah, yang baru diketahui setelah akad nikah dilaksanakan.
- (5) *Li'an* dengan alasan:
- (a) Suami menuduh istrinya telah berbuat zina.
  - (b) Suami mengingkari anak yang dikandung istrinya.
  - (c) Suami mengingkari anak yang dikandung istrinya sebagai anaknya.
- (6) *Ila* dengan alasan:
- Suami bersumpah untuk tidak menggauli istrinya.
- (7) *Zhihar* dengan alasan:

Suami telah mengucapkan sumpah untuk menjauhkan istrinya dengan mengatakan bahwa istrinya di ibaratkan seperti punggung ibunya.

(8) *Syiqaq* dengan alasan:

- (a) Terjadi perselisihan dan percekocokan antara suami istri secara terus menerus dan tidak dapat didamaikan.
- (b) Istri atau suami saling membenci.

**b) Alasan-Alasan Perceraian Menurut Hukum Positif di Indonesia.**

(1) Berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975.

- (a) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;

Menurut Riduan Syahrani, pengertian zina pada rumusan alasan perceraian ini adalah zina menurut konsepsi agama yakni setiap persetubuhan bukan dengan suami/istri sendiri, yang dilakukan dengan kesadaran atau atas kemauan sendiri, bukan karena dipaksa orang lain (Riduan Syahrani, 1987:52).

- (b) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.

Menurut Lili Rasyidi, uraian alasan tersebut memuat beberapa syarat yang harus kita perhatikan sebagai alasan untuk bercerai, yakni: Meninggalkan yang lain harus tanpa izin pihak yang ditinggalkan. Selama dua tahun berturut-turut yang berarti bahwa kepergiannya tersebut harus penuh dua tahun lamanya dan selama itu belum pernah kembali, tanpa sebab yang sah, Karena di luar kemampuannya (Drs. Lili Rasyidi 1983:17)

- (c) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;

Alasan perceraian ini dapat diajukan apabila putusan tersebut sudah memiliki kekuatan hukum tetap sebagaimana yang tertulis dalam pasal 23 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 yang menyatakan: Gugatan perceraian karena alasan salah seorang dari suami- istri mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat sebagai dimaksud dalam Pasal 19 huruf c maka untuk mendapat putusan perceraian sebagai bukti penggugat cukup menyampaikan salinan putusan pengadilan yang memutuskan perkara disertai keterangan yang menyatakan bahwa putusan itu telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Peraturan yang merumuskan alasan perceraian ini, bertujuan untuk melindungi pihak yang tidak terdakwa agar jangan sampai kehidupannya menderita karena ditinggalkan selama lima tahun (Abdurrahman, S.H. dan Ridwan Syahrani, S.H., 1978:78).

- (d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;

Pengertian “membahayakan” sebaiknya ditafsirkan sebagai yang membahayakan jasmani tapi juga jiwa para pihak.

Untuk alasan perceraian ini, Hakim membutuhkan surat keterangan *Visum et Repertum* dari dokter atau keterangan Ahli Jiwa tentang pihak yang melakukan dan perasaan pihak yang diperlakukan (Drs. Lili Rasyidi, 1983:20).

- (e) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;

Penilaian untuk mempertimbangkan alasan perceraian ini diserahkan kepada Hakim. Hakimlah yang akan menentukan secara pasti terhadap semua keadaan, apakah dapat dijadikan alasan untuk bercerai sebagaimana yang dimaksud alasan perceraian ini. Untuk mempertimbangkan semua keadaan itu, hakim memang dituntut untuk berhati-hati sekali, sebab masalahnya mungkin tidak harus dilihat dari satu segi saja, akan tetapi beberapa segi yang sifatnya kompleks sekali, yang meliputi soal ekonomi, kesehatan, kejiwaan, kesejahteraan, pemeliharaan dan pendidikan anak dan sebagainya (Riduan Syahrani 1987:56).

- (f) Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

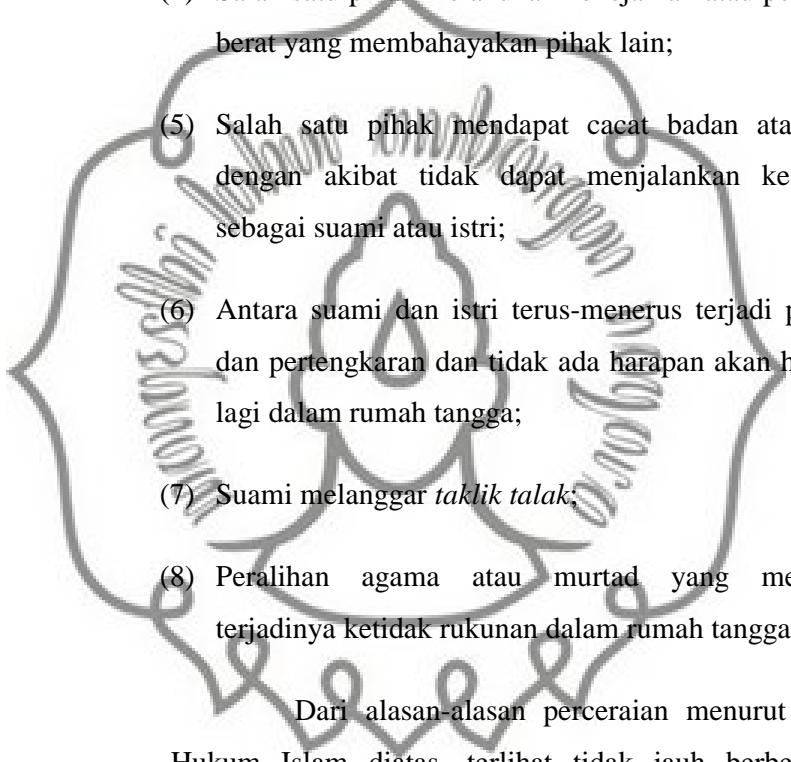
Penafsiran arti perselisihan dan pertengkaran terus-menerus diserahkan kepada kebijaksanaan hakim tentunya dengan mempertimbangkan segala hal (Abdurrahman, S.H. dan Ridwan Syahrani, S.H., 1978:22).

- (2) Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam.

Alasan-alasan Berdasarkan menurut Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam adalah:

- (1) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;



- 
- (2) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
  - (3) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
  - (4) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
  - (5) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri;
  - (6) Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
  - (7) Suami melanggar *taklik talak*;
  - (8) Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Dari alasan-alasan perceraian menurut Kompilasi Hukum Islam diatas, terlihat tidak jauh berbeda dengan alasan-alasan perceraian menurut Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975. Dalam Kompilasi Hukum Islam terdapat penambahan yakni:

- (a) Suami melanggar *taklik talak*;
- (b) Peralihan agama atau *murtad* yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Penambahan tersebut dikarenakan pengalaman Pengadilan Agama yang sering menolak gugatan perceraian atas dalil suami atau istri beralih agama atau *murtad*. Alasan penolakan yang dilakukan oleh hakim didasarkan pada pertimbangan bahwa Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tidak mengatur masalah murtad sebagai alasan perceraian, padahal menurut hukum Islam. Hal ini sangat beralasan untuk memutuskan perkawinan (Drs. Moh Mahfud, Drs. Sidik Tono, Drs. Dadan Muttaqien, 1993:91)

### 3 Tinjauan Umum Tentang Peradilan Agama

#### 1) Peradilan Agama Kewenangan Peradilan Agama

Dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pengadilan Agama menjelaskan bahwa Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. Sedangkan Jimly Asshiddiqie berpendapat bahwa Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam (Bambang Sutyoso dan Sri Hastuti Puspitasari, 2005:34). Berdasarkan kedua definisi tersebut dijelaskan bahwa Peradilan Agama adalah lembaga yang bertugas untuk menyelenggarakan kekuasaan kehakiman guna menegakkan hukum dan keadilan yang didasarkan pada ketentuan Islam dan diperlukan bagi orang-orang yang beragama Islam yang dengan sukarela menundukkan diri pada ketentuan yang ada di Peradilan Agama.

#### 2) Kewenangan Peradilan Agama

Pasal 1 Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan kehakiman Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan berdasar Pancasila demi

terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Berdasarkan hal tersebut Pengadilan Agama adalah sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman disamping tiga peradilan lainnya yaitu peradilan umum, peradilan militer dan peradilan tata Usaha Negara.

Suatu kekuasaan kehakiman, memiliki dua kewenangan atau kompetensi, yaitu kewenangan relatif dan kewenangan absolut. Kewenangan relatif diartikan sebagai kekuasaan peradilan yang satu jenis dan satu tingkatan, dalam perbedaannya dengan kekuasaan pengadilan yang sama jenis dan sama tingkatan (Basiq Djalil, 2006:138). Kewenangan absolut yaitu kekuasaan pengadilan yang berhubungan dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkatan pengadilan dalam perbedaannya dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkatan pengadilan lainnya (Basiq Djalil, 2006:139). Kekuasaan pengadilan agama menurut pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. tentang Peradilan Agama, pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

- (1) Perkawinan;
- (2) Kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam;
- (3) Wakaf dan shadaqah;
- (4) Zakat;
- (5) Infaq; dan
- (6) Ekonomi syariah

Kewenangan diatas inilah yang disebut kewenangan absolut pengadilan agama di Indonesia. Sedangkan Lingkup kewenangan Pengadilan Agama adalah (Bambang Sutiyoso dan Sri Hastuti Puspitasari, 2005: 35);

- (1) Peradilan bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam;
- (2) Memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara perdata tertentu, yakni bidang : (a) perkawinan; (b) kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan Islam; (c) wakaf dan sedekah. (d) Infaq; (d) Zakat; dan (e) Ekonomi Syariah.

Dalam operasionalnya kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama. Pengadilan Agama merupakan pengadilan tingkat pertama dan Pengadilan Tinggi Agama merupakan Pengadilan tingkat banding, yang berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai pengadilan Negara tertinggi dan secara administratif Pengadilan Agama berada di bawah Departemen Agama.

Pengadilan Agama terdiri dari : (Bambang Sutiyoso dan Sri Hastuti Puspitasari, 2005: 35).

- (a) Pengadilan Agama sebagai pengadilan tingkat pertama berkedudukan di kotamadya atau ibukota kabupaten dengan wilayah hukum meliputi wilayah kotamadya atau kabupaten.
- (b) Pengadilan Tinggi Agama sebagai pengadilan tingkat banding yang berkedudukan di ibukota propinsi, dan daerah hukumnya meliputi wilayah propinsi.

Sedangkan klasifikasi Pengadilan Agama di bagi menjadi 4 (empat) kelas, yaitu:

1. Pengadilan Agama Kelas I A

2. Pengadilan Agama Kelas I B
3. Pengadilan Agama Kelas II A
4. Pengadilan Agama Kelas II B

Klasifikasi tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan luas atau besarnya kota dimana Pengadilan itu berada, jumlah perkara yang masuk dan ditangani, kualifikasi perkara (berat atau ringan), dan tingkat penyelesaian perkara di tiap-tiap Pengadilan tersebut.

Inilah yang disebut kewenangan relatif pengadilan agama. Kewenangan yang didasarkan pada daerah hukum untuk setiap kantor pengadilan agama di seluruh wilayah Indonesia.

#### **4 Pengertian Mengenai Putusan Pengadilan Agama**

##### **(a) Definisi Putusan**

Salah satu tugas pokok Pengadilan Agama adalah mengadili atau memutus perkara yang diajukan kepadanya yang dituangkan dalam putusan. Putusan Hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat Negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan dipersidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak (Sudikno Mertokusumo, 2002:202). Berdasarkan hal tersebut, putusan yang diucapkan oleh hakim di persidangan adalah harus sama dengan amar putusan yang tertulis (vonis)

##### **(b) Bentuk dan Macam Putusan Pengadilan Agama**

Putusan Pengadilan Agama adalah dalam bentuk tertulis dan Pengadilan Agama adalah lembaga yang berwenang membuat putusan sesuai dengan kewenangan absolut yang diberikan kepadanya (Chatib Rasyid, 2009: 119).

Adapun macam-macam putusan dalam pengadilan agama dapat dinagi menjadi dua, yaitu:

(1) Putusan Sela

Putusan Sela adalah putusan yang dijatuhkan sebelum putusan akhir yang diadakan dengan tujuan untuk memungkinkan atau mempermudah kelanjutan pemeriksaan perkara. Dalam hukum acara perdata dikenal beberapa macam putusan sela, yaitu (Chatib rasyid, 2009:118):

- (a) Putusan *Preparatorioir*, yaitu putusan persiapan mengenai jalannya pemeriksaan untuk melancarkan segala sesuatu guna mengadakan putusan akhir;
- (b) Putusan *Interlocutoir*, yaitu putusan yang isinya memerintahkan pembuktian;
- (c) Putusan *Incidental*, yaitu putusan yang berhubungan dengan insiden, seperti putusan yang bertujuan untuk menghentikan prosedur biasa;
- (d) Putusan *Provisional*, yaitu putusan yang menjawab tuntutan provisa dalam hal penggugat meminta agar diadakan tindakan pendahuluan sebelum putusan akhir dijatuhkan.

(2) Putusan Akhir

Putusan akhir adalah kesimpulan akhir yang diambil oleh majelis hakim yang diberi wewenang untuk itu menyelesaikan perkara dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum (Abdul Manan, 2000: 173). Putusan akhir apabila dilihat dari amarnya dapat dibagi menjadi tiga macam yaitu (Chatib Rasyid, 2009: 118-119):

- (a) Putusan *condemnatoir*, yaitu yang amarnya bersifat menghukum pihak yang dikalahkan untuk memenuhi prestasi.

Amar yang bersifat *condemnatoir* tersebut dirinci sebagai berikut:

- (1) Menghukum atau memerintahkan untuk menyerahkan;
  - (2) Menghukum atau memerintahkan untuk mengosongkan;
  - (3) Menghukum atau memerintahkan untuk membagi;
  - (4) Menghukum atau memerintahkan untuk melakukan sesuatu;
  - (5) Menghukum atau memerintahkan untuk menghentikan sesuatu;
  - (6) Menghukum atau memerintahkan untuk membayar sesuatu;
  - (7) Menghukum atau memerintahkan untuk membongkar;
  - (8) Menghukum atau memerintahkan untuk tidak melakukan sesuatu;
- (b) Putusan *Declaratoir* adalah putusan yang amarnya menyatakan bahwa keadaan tertentu sebagai keadaan yang resmi menurut hukum. Misalnya “Menyatakan sah atau tidak suatu perbuatan hukum. Amarnya dimulai dengan menyatakan.....”
- (c) Putusan *Konstitutif* adalah putusan yang bersifat menghentikan atau menimbulkan hukum baru. Misalnya memutus suatu ikatan perkawinan. Contoh “Menyatakan bahwa perkawinan A dan B putus karena.....”

(c) Kekuatan Putusan Pengadilan Agama

Putusan Pengadilan Agama memiliki tiga macam kekuatan pembuktian diantaranya adalah:

(1) Kekuatan mengikat kepada para pihak

Putusan Pengadilan Agama yang dijatuhkan oleh hakim adalah untuk menyelesaikan perkara yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat dengan menetapkan siapa yang berhak menentukan hukumnya. Menurut Yahya Harahap putusan pengadilan agama bersifat mengikat kepada beberapa pihak, diantaranya adalah (Yahya Harahap, 2003:310):

- (a) terhadap pihak yang berperkara;
- (b) terhadap orang yang mendapat hak dari merk, dan
- (c) terhadap ahli waris mereka.

Oleh karena putusan mempunyai kekuatan mengikat maka para pihak yang telah ditentukan mempunyai kewajiban untuk mentaati putusan yang ada.

Mukti Arta dalam bukunya *Praktek Perkara Perdata* menyebutkan bahwa putusan hakim memiliki kekuatan mengikat yang artinya (Mukti Arta, 1996:264-265):

- a. Putusan hakim itu mengikat para pihak yang berperkara dan yang terlibat dalam perkara itu;
- b. Para pihak harus tunduk dan menghormati putusan itu;
- c. Terikatnya para pihak terhadap putusan hakim ini, baik dalam arti positif maupun negative (Pasal 1917, 1920 BW, 134 Rv);
- d. Mengikat dalam arti positif, yakni bahwa apa yang telah diputus oleh hakim harus dianggap benar (*Res judicata pro veritate habetur*), dan tidak dimungkinkan pembuktian lawan;



- e. Mengikat dalam arti negatif, artinya bahwa hakim tidak boleh memutus lagi perkara yang pernah diputus sebelumnya antara pihak yang sama serta pokok perkara yang sama (*nebis in idem*), (Pasal 134 Rv);
- f. Putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tidak boleh dirubah, sekalipun oleh pengadilan yang lebih tinggi, kecuali dengan upaya hukum yang luar biasa (yaitu *Request civil* dan *derden verzet*);
- g. Segala pertimbangan hakim yang dijadikan dasar putusan serta amar putusan (*dictum*) merupakan satu kesatuan dan mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- h. Sedang mengenai hasil konstatirng hakim (penetapan) mengenai kebenaran peristiwa tertentu dengan alat bukti tertentu, maka dalam sengketa lain peristiwa tersebut masih dapat disengketakan.

## (2) Kekuatan Pembuktian

Seperti yang telah dikemukakan oleh Chatib Rasyid putusan Pengadilan Agama berbentuk tertulis, oleh karena itu Putusan Pengadilan Agama dapat digolongkan kepada akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna. Berdasarkan hal tersebut maka putusan pengadilan dapat dijadikan alat bukti yang sempurna tentang penyelesaian apa yang disengketakan oleh para pihak. Selanjutnya putusan pengadilan agama dapat digunakan oleh para pihak untuk alat bukti untuk mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Agama, kasasi ke Mahkamah RI atau mengajukan permohonan eksekusi apabila pihak yang dikalahkan tidak bersedia melakukan isi putusan pengadilan agama tersebut secara sukarela.

Mukti Arta menyebutkan bahwa putusan hakim memiliki kekuatan pembuktian yang berarti bahwa (Mukti Arta, 1996: 165);

- a. Dengan putusan hakim itu telah diperoleh tentang sesuatu yang terkandung dalam putusan itu;
- b. Putusan hakim menjadi bukti dalam kebenaran sesuatu yang termuat didalamnya;
- c. Putusan pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat menjadi bukti dalam sengketa perkara perdata mengenai hal itu (tindak pidana) (Pasal 1918 dan 1919 Bw).
- d. Demikian pula putusan perdata menjadi bukti dalam sengketa perdata mengenai hal itu;
- e. Apa yang diputuskan hakim harus dianggap benar dan tidak boleh diajukan lagi perkara baru mengenai hal yang sama dan antara pihak-pihak yang sama pula (*nebis in idem*).

### (3) Kekuatan Eksekutorial

Putusan Pengadilan Agama yang mempunyai kekuatan eksekutorial hanyalah putusan yang bersifat *condemnatoir* yang kepala putusannya tercantuk kata “BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM” dan di ikuti kata “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” (Chatib Rasyid, 2009:120). Berdasarkan kata “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” inilah yang member kekuatan eksekutorial pada putusan-putusan pengadilan.

Putusan hakim mempunyai kekuatan eksekutorial yakni kekuatan untuk dilaksanakan apa yang ditetapkan putusan itu secara paksa oleh alat-alat negara. Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor

50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Peradilan Agama maka pengadilan agama telah dapat melaksanakan sendiri tindakan eksekusi atas putusan yang dijatuhkan itu tidak perlu lagi lembaga pengukuhan dan fiat eksekusi oleh pengadilan negeri (Mukti Arta, 1996:265).

## B. Kerangka Pemikiran

Sudah menjadi kodratnya bahwa manusia merupakan makhluk sosial yang membutuhkan manusia lain untuk menjalani roda kehidupan. Hal tersebut dilakukan manusia dengan cara mencari teman dan mencari pasangan hidup. Adapun cara yang ditempuh untuk melanjutkan garis keturunannya adalah dengan cara melangsungkan perkawinan. Semua manusia mengharapkan kehidupan perkawinan dapat berlangsung terus sampai akhir hayatnya. Hal ini diperkuat sebagaimana dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa prinsip perkawinan adalah suatu tekad yang suci yang dibangun oleh suami-istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia.

Perkawinan dapat diputus apabila terjadi karena alasan-alasan yang prinsipil, yang apabila rumah tangganya dipertahankan akan terjadi kemadharatan dan tampak buruk yang lebih besar daripada dampak positifnya. Hal-hal mengenai perceraian telah diatur dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, serta PP No. 9 Tahun 1975.

Namun banyak terjadi dimasyarakat adanya fenomena salah satu pihak pergi meninggalkan pihak lain tanpa izin selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya serta tidak diketahui alamatnya atau keberadaanya. Hal tersebut menjadi salah satu alasan untuk putusnya perkawinan. Untuk itu penulis mencoba untuk mengetahui dasar

pertimbangan hakim dalam memutus perkara perceraian dengan alasan salah satu pihak pergi tanpa ijin pihak lain seperti yang telah termuat dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Secara garis besar kerangka pemikiran dalam penulisan hukum ini dapat dilihat dalam skema berikut ini:

#### **Kerangka Pemikiran**



### BAB III

#### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

##### A. Hasil Penelitian

##### 1. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Perkara Perceraian (Studi Kasus Putusan Nomor Register Perkara 1055/Pdt.G/2009/PA.Kra).

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan penulis terhadap putusan nomor 1055/Pdt.G/2009/PA.Kra yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Karanganyar. Perkara perceraian merupakan kasus yang paling banyak diputus di Pengadilan Agama tersebut di samping perkara-perkara yang lain dan di antara putusan yang dijatuhkan berupa putusan *verstek*. Dalam hal perkara perceraian karena salah satu pihak pergi meninggalkan tempat kediaman tanpa diketahui alamatnya putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim adalah putusan *verstek*.

Dasar hukum putusan *verstek* adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 125 HIR/149RBg. Pasal 125 HIR ayat (1) dan (2) mengatur bahwa:

- 1) “Apabila pada hari sidang yang telah ditentukan tergugat tidak hadir dan tidak pula mengirimkan wakilnya, padahal ia telah dipanggil dengan patut, maka gugatan itu diterima dengan putusan tak hadir (*verstek*), kecuali kalau ternyata bagi pengadilan negeri bahwa gugatan tersebut melawan hak atau tidak beralasan.
- 2) Akan tetapi jika tergugat, didalam surat jawabannya yang tersebut Pasal 121 mengemukakan eksepsi (perlawanan) bahwa pengadilan negeri tidak berkuasa akan memeriksa perkara, maka meskipun ia sendiri atau wakilnya tidak datang wajiblah pengadilan negeri memberikan keputusan tentang eksepsi itu sesudah didengarnya orang yang mendakwa itu ; hanya jika eksepsi itu tidak dibenarkan maka pengadilan negeri akan memutuskan pokok perkara itu”.

Kemungkinan dijatuhkannya putusan *verstek* dalam perkara perceraian dapat disebabkan :

- a. Tergugat/Termohon tidak pernah hadir di persidangan.
- b. Tergugat/Termohon tidak diketahui alamat tempat tinggalnya di Indonesia (*gaib*).

Dalam hal tergugat/termohon tidak hadir dalam sidang pertama dan tidak pula mengirimkan orang lain sebagai wakilnya (kuasa hukum), maka proses pemeriksaan akan diteruskan dengan memeriksa identitas pihak penggugat/pemohon, diteruskan memeriksa relaas panggilan apakah sudah resmi dan patut atau belum. Selain itu juga akan diperiksa hasil pemanggilan yang telah dilakukan oleh juru sita/juru sita pengganti yang bertugas untuk melakukan pemanggilan apakah bertemu pihak yang dipanggil atau tidak, apabila bertemu langsung dengan pihak yang dipanggil (tergugat/termohon), maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan/permohonan setelah dilakukan upaya perdamaian dan tidak berhasil. Apabila juru sita/juru sita pengganti tidak bertemu dengan pihak yang dipanggil, maka majelis hakim tidak memeriksa lebih lanjut akan tetapi memanggil tergugat/termohon sekali lagi pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan oleh pengadilan. Penundaan sidang untuk memanggil tergugat/termohon kembali tersebut dimaksudkan untuk memberi keyakinan pada hakim bahwa tergugat/termohon telah mengetahui tentang perkara yang telah diajukan oleh penggugat/termohon.

Dalam hal tergugat/termohon tidak diketahui alamat tempat tinggalnya di Indonesia, yang pada umumnya di Pengadilan Agama di sebut *gaib*, hal ini bisa saja terjadi sejak awal pada waktu penggugat/pemohon mengajukan gugatan/permohonan sudah tidak diketahui alamat kediaman bersama dalam waktu yang cukup lama dan telah dicari diberbagai tempat akan tetapi tidak ketemu, sehingga sejak awal pengajuan perkara telah ditetapkan sebagai perkara *gaib*. Akan tetapi adakalanya perkara *gaib* tersebut baru diketahui pada saat proses persidangan. Kasus seperti ini terungkap pada waktu hakim memeriksa relaas panggilan dan ternyata pihak yang dipanggil tersebut tidak diketahui alamatnya, tidak dikenal atau sudah tidak berada

ditempat tersebut. Karena dalam hal ini juru sita/juru sita pengganti memberikan panggilan ke alamat yang tertera di dalam Kartu Tanda Penduduk tergugat/termohon.

Dalam kasus seperti tersebut, penggugat/pemohon biasanya disarankan untuk merubah surat gugatannya menjadi perkara *gaib* atau pihak lawan tidak diketahui alamat tempat tinggalnya di Indonesia. Setelah penggugat/pemohon merubah surat gugatannya (dalam hal alamat tempat tinggal pihak tergugat/termohon), maka majelis hakim menetapkan menunda perkara tersebut untuk memanggil pihak tergugat/termohon. Oleh karena perkara tersebut merupakan perkara perceraian, maka panggilannya dilakukan sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yang pada pokoknya adalah :

- a. Menempelkan surat gugatan penggugat/pemohon pada papan pengumuman di Pengadilan Agama dan mengumumkan melalui satu atau beberapa mass media.
- b. Pengumuman melalui mass media dilakukan sebanyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu 1 (satu) bulan antara pengumuman pertama dan kedua.
- c. Tenggang waktu mengenai relaas panggilan terakhir dengan persidangan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan.
- d. Apabila tergugat/termohon atau kuasanya tidak hadir, gugatan diterima tanpa hadirnya tergugat/termohon.

Sikap hakim di Pengadilan Agama Karanganyar dalam menunda pemeriksaan perkara dan memanggil tergugat/termohon sekali lagi dalam sidang pertama tidak hadir merupakan sikap mengambil jalan tengah apabila dalam kasus lain ditemukan justru pihak penggugat/pemohon tidak hadir dalam sidang pertama. Maksudnya apabila dalam sidang pertama penggugat/pemohon tidak hadir dan tergugat/pemohon hadir, sikap hakim

tidak serta merta untuk menggugurkan perkara tersebut melainkan menunda dan memanggil sekaligus pihak penggugat/pemohon

Untuk lebih mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan perkara perceraian dengan alasan salah satu pihak pergi meninggalkan tempat kediaman tanpa diketahui alamatnya (*gaib*), perlu kiranya diketengahkan contoh putusan *verstek* terhadap perkara perceraian karena hal tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Putusan yang disampaikan dimaksudkan sebagai sampel dan gambaran secara umum, namun tidak dimaksudkan sebagai generalisasi atas semua putusan *verstek* terhadap perkara perceraian dengan alasan salah satu pihaknya pergi dan tidak diketahui alamatnya.

Adapun putusan yang dipilih untuk penulisan ini adalah Putusan Pengadilan Agama Karanganyar Nomor : 1055/Pdt.G/2009/PA.Kra

a. Kasus Posisi:

Pada tanggal 6 Oktober 1998 telah terjadi perkawinan penggugat dan tergugat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jenawi Kabupaten Karanganyar. Dari hasil perkawinannya telah dikaruniai 1 orang anak.

Pada awalnya rumah tangga antara keduanya berjalan baik dan rukun, tetapi sejak bulan November 2002 rumah tangga penggugat dan tergugat mulai goyah disebabkan masalah ekonomi. Tergugat memberi nafkah kepada penggugat tetapi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan penggugat bekerja sendiri untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, sejak saat itu sering timbul pertengkaran dan perselisihan kemudian tergugat pamit pergi untuk mencari pekerjaan tetapi sampai sekarang sejak 6 (enam) tahun tidak pernah pulang, tidak mengirimkan nafkah kepada keluarga dan tidak pernah pulang.

Akibatnya sejak bulan Oktober 2003 penggugat dengan tergugat pisah tempat tinggal, penggugat bertempat tinggal di Seloromo Jenawi, sedangkan tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya. Setelah terjadi



perpisahan selama kurang lebih 6 (enam) tahun dan ternyata selama hidup pisah tersebut tergugat tidak pernah datang dan juga tidak pernah memberikan nafkah. Penggugat menganggap tergugat telah melanggar *ta'klik talaknya* yang telah diucapkan pada waktu akad nikah.

Atas dasar alasan-alasan tersebut, penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat ke Pengadilan Agama Karanganyar, agar berkenan memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- 1) Mengabulkan gugatan penggugat.
- 2) Menyatakan putus perkawinan penggugat dengan tergugat dengan jatuh talak satu *Khul'i* dengan *Iwald* Rp 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah).
- 3) Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 266.000,- (Dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).
- 4) Jika pengadilan berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya.

b. Upaya Perdamaian dan Pembacaan Gugatan

Pada hari persidangan yang telah ditetapkan, tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, ternyata tidak hadir dalam persidangan dan ketidak hadirannya tidak didasari suatu alasan yang sah, lagi pula tidak mengirimkan orang lain sebagai wakilnya (kuasanya), meskipun telah dipanggil oleh Pengadilan Agama Karanganyar melalui Radio Lokal RSPD Kabupaten Karanganyar, maka pemeriksaan dilaksanakan dengan tanpa hadirnya pihak tergugat. Namun demikian meskipun tergugat tidak hadir dalam persidangan Majelis Hakim tetap berkewajiban untuk mengupayakan perdamaian dengan cara menasehati pihak penggugat agar mengurungkan kehendak cerainya dan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga dengan tergugat. Ternyata upaya perdamaian yang

diupayakan oleh majelis hakim tersebut tidak berhasil dan penggugat tetap dengan gugatannya.

Selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan penggugat yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Karanganyar dibawah register nomor: 1005/Pdt.G/2009/PA.Kra yang ternyata isi dan maksud dari surat gugatan tersebut masih dipertahankan oleh penggugat.

### c. Pembuktian

Dari suatu peristiwa atau fakta yang diajukan oleh para pihak, maka hakim harus memeriksa kebenaran yang bersangkutan dan kebenaran peristiwa ini hanya dapat diperoleh dengan pembuktian. Pada dasarnya pembuktian (yang dilakukan oleh hakim) adalah untuk menentukan hubungan hukum yang sebenarnya terhadap pihak-pihak yang berperkara. Dengan bahasa lain dapat disampaikan bahwa pembuktian dimaksudkan untuk mencapai suatu kebenaran yang sesungguhnya dan didasarkan pada bukti-bukti. Alat bukti dalam Pengadilan Agama pada kasus perceraian dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, terdiri dari 5 acara pembuktian. Lima acara pembuktian kasus perceraian tentang:

- 1) Pembuktian dalam permohonan cerai talak (Pasal 70);
- 2) Pembuktian dalam gugatan perceraian didasarkan atas alasan salah satu pihak mendapat pidana penjara (Pasal 74);
- 3) Pembuktian dalam gugatan perceraian didasarkan atas alasan tergugat mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dijalankan kewajiban sebagai suami. (Pasal 75);
- 4) Pembuktian dalam gugatan perceraian didasarkan atas alasan *syiqoq* (Pasal 76);

- 5) Pembuktian dalam gugatan perceraian didasarkan atas alasan zina (Pasal 87).

Kelima acara pembuktian tersebut merupakan alat yang dapat digunakan sebagai pertimbangan hakim menilai, memeriksa, dan mengambil keputusan. Pembuktian dalam persidangan merupakan alat bagi hakim yang obyektif untuk menentukan suatu proses perceraian.

Beberapa pembuktian dalam sidang perceraian di antaranya adalah: Pengakuan. Pengakuan sebagai alat pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan dapat ditentukan dari pelaku tergugat, di mana pengakuan ini merupakan pembuktian kunci sebagai alasan hakim menentukan keputusan. Tapi dalam kasus ini, alat bukti berupa pengakuan dari pihak lawan tidak dapat dilakukan oleh tergugat atau kuasanya, karena tergugat tidak diketahui keberadaannya. Untuk pembuktian peristiwa atau kejadian di muka persidangan dilakukan dengan menggunakan alat-alat bukti.

Dengan alat-alat bukti yang diajukan tersebut, maka dapat memberikan dasar bagi hakim untuk mengambil keputusan setelah menilai dan memeriksa alat bukti tersebut. Memberikan dasar-dasar yang cukup kepada hakim dalam pemeriksaan suatu perkara agar dapat memberikan kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan. Sesuatu hal yang dibuktikan adalah yang dibantah oleh pihak lawan. Alat-alat bukti yang dapat digunakan dalam persidangan di antaranya (Pasal 164 HIR/Pasal 284 RBg/Pasal 1866 BW) :

1. Alat bukti tertulis (surat)

Menurut Tirtaatmidjaja (1993: 159), bukti tertulis adalah alat bukti yang berupa surat, yaitu setiap rentetan atau susunan huruf bacaan dengan apa diwujudkan suatu pikiran tertentu. Tidak peduli di atas kertas, maupun di atas kayu, batu, kain dan lain-lain. Alat bukti tertulis (surat) bisa berupa akta otentik, akta di bawah tangan, dan bukan akta. Akta otentik adalah suatu akta yang dibuat oleh atau dihadapan Pejabat

yang diberi wewenang untuk itu, merupakan bukti yang lengkap antara para pihak dan para ahli warisnya dan mereka yang mendapat hak dari padanya tentang yang tercantum di dalamnya sebagai pemberitahuan belaka. Akta otentik merupakan bukti yang sempurna bagi kedua belah pihak, ahli warisnya dan orang-orang yang mendapat hak dari padanya. Akta otentik termasuk akta yang dibuat oleh pejabat seperti berita acara yang dibuat oleh polisi dan panitera pengganti di persidangan dan akta yang dibuat oleh para pihak.

Akta di bawah tangan adalah akta yang sengaja dibuat untuk pembuktian oleh para pihak tanpa bantuan pembuat yang berwenang / notaris, seperti kuitansi, perjanjian sewa-menyewa dsb.

Adapun kekuatan bukti akta di bawah tangan ini tidak seperti akta autentik, yakni bukan merupakan bukti yang sempurna. Akan tetapi, bila akta di bawah tangan ini diakui oleh pihak yang bersangkutan, maka naiklah derajat dari tidak merupakan bukti yang sempurna menjadi bukti yang sempurna (Mardani, 2009:110).

## 2. Alat bukti saksi

Alat bukti saksi dapat berupa hasil pemeriksaan saksi (Pasal 144 – 152 HIR dan Pasal 171 – 179 RBg) dan keterangan dari saksi (Pasal 168 – 172 HIR/Pasal 306 – 309 RBg dan Pasal 1895 dan 1902 – 1912 BW).

Suatu kesaksian adalah kepastian yang diberikan kepada hakim di persidangan tentang peristiwa yang disengketakan dengan jalan pemberitahuan secara lisan dan pribadi oleh orang yang bukan salah satu pihak dalam perkara yang dipanggil dipersidangan (Sudikno, 1993:134).

Keterangan yang diberikan oleh saksi harus tentang peristiwa atau kejadian yang dialaminya sendiri, sedangkan pendapat atau dugaan yang diperoleh secara berpikir tidaklah merupakan kesaksian. Keterangan saksi itu harus diberikan secara lisan dan pribadi di

persidangan, jadi harus diberitahukan sendiri, tidak diwakilkan serta tidak boleh dibuat secara tertulis.

Walaupun saksi sudah memberikan keterangan di persidangan di muka hakim, hakim tidak dapat dipaksa untuk mempercayai saksi, sebab mungkin saja suatu saksi palsu. Oleh karena itu, hakim harus berhati-hati dan memperhatikan benar, apakah ada kesesuaian antara keterangan seorang saksi dengan isi perkara yang disengketakan, bagaimana sifat-sifat dan adat istiadat saksi, ada hubungan apakah antara saksi dengan yang disaksikan. Oleh karena itu, ada suatu asas yang berbunyi: *unus testis nullus testis* = satu alat bukti bukanlah alat bukti, sehingga seorang saksi bukanlah saksi, kecuali kalau dikuatkan dengan alat bukti lain misalnya ditambah dengan pengakuan tergugat atau sumpah.

Adapun macam-macam saksi terbagi kepada saksi biasa dan saksi ahli. Saksi biasa yaitu kesaksian yang diberikan oleh orang umum, sedangkan saksi ahli yaitu seorang yang mempunyai pengetahuan khusus tentang sesuatu persoalan.

Dalam Hukum Acara Perdata Islam persaksian diatur dalam QS. Ath-Thalaq (65): 2 dengan QS. Al-Baqarah (2):283. Adapun syarat-syarat saksi menurut Sayid Sabiq, yaitu Islam, *baligh*, adil, berakal, dapat bicara, kuat ingatan, dan tidak ada *tuhmah* (orang yang disangsikan maksud baiknya dalam memberikan kesaksian, mungkin karena benci atau terlalu sangat cinta terhadap yang disaksikan, seperti kesaksian ayah terhadap anaknya atau kesaksian seseorang terhadap musuhnya). Persyaratan saksi harus adil diatur dalam QS. Ath-Thalaq (65) ayat 2, saksi harus 2 (dua) orang diatur di dalam QS. A-Baqarah (2) ayat 282, tetapi khusus dalam masalah harta lebih konkretnya dalam sengketa gugat menggugat, apabila tidak ada 2 (dua) orang saksi, maka boleh dengan 1 (satu) orang saksi ditambah sumpah. Hal ini berdasarkan hadis Nabi Riwayat Muslim, Abu daud, dan An-Nasa'I (Mardani, 2009:111-112)

### 3. Alat bukti persangkaan

Persangkaan adalah kesimpulan-kesimpulan yang oleh undang-undang atau hakim ditarik dari suatu peristiwa yang terang nyata kearah peristiwa lain yang belum terang kenyataannya (Pasal 1915 ayat (1) BW).

Dengan demikian persangkaan merupakan alat bukti yang tidak langsung yang ditarik atau disimpulkan dari alat bukti lainnya, yakni dengan menyimpulkan dari fakta yang sudah terbukti kearah fakta yang belum terbukti.

### 4. Alat bukti pengakuan (Pasal 174, 175 dan 176 HIR/Pasal 311, 312 dan 313 RBg)

Pengakuan di muka hakim di persidangan merupakan keterangan sepihak baik tertulis maupun lisan yang tegas dan dinyatakan oleh salah satu pihak dalam perkara dipersidangan yang membenarkan baik seluruhnya atau sebagian dari suatu peristiwa, hak atau hubungan hukum yang diajukan oleh lawannya yang mengakibatkan pemeriksaan lebih lanjut oleh hakim tidak perlu lagi (Sudikno, 1999: 149).

Pengakuan suatu pihak dapat ditinjau dari 2 (dua) segi, ditinjau dari segi acara pelaksanaannya adalah pengakuan yang dikemukakan terhadap suatu pihak, ada yang dilakukan di muka hakim dan ada yang dilakukan di luar sidang pengadilan. Pengakuan di muka hakim di persidangan (*gerechtelijke behententis*) ialah suatu pernyataan tegas oleh seseorang di muka sidang pengadilan, yang membenarkan seluruh dakwaan lawan, walau hanya satu, atau lebih dari satu, hak-hak atau hubungan yang didakwakan. Pengakuan di muka hakim, baik yang di ucapkan sendiri maupun pertolongan kuasanya, merupakan bukti yang cukup mudah, artinya hakim harus menerima pengakuan itu sebagai alat bukti yang cukup.

Pengakuan di luar persidangan adalah keterangan yang diberikan oleh salah satu pihak dalam suatu perkara perdata diluar persidangan untuk membenarkan pernyataan-pernyataan yang diberikan oleh

lawannya. Kekuatan pembuktian yang dilakukan di luar sidang adalah sepenuhnya diserahkan kepada kebijaksanaan hakim, atau sama sekali tidak dapat memberikan kekuatan pembuktian, atau juga dapat mengambil sikap tengah, yang dianggap sebagai bukti permulaan (*begin van bewijs*) yang dapat disempurnakan secara tambahan dengan alat bukti lain (Mardani, 2009:113).

5. Alat bukti sumpah (Pasal 155 – 158 dan Pasal 177 HIR/Pasal 182 – 185 dan Pasal 314 RBg)

Pada umumnya sumpah adalah suatu pernyataan yang khidmat diberikan atau diucapkan pada waktu memberi janji atau keterangan dengan mengingat akan sifat maha kuasa dari Tuhan, dan percaya bahwa siapa yang memberi keterangan atau janji yang tidak benar akan dihukum oleh-Nya. Jadi hakikatnya sumpah merupakan tindakan yang bersifat religius yang digunakan dalam peradilan (Sudikno, 1993: 154).

Sumpah menurut pembagiannya dibagi kepada 2 (dua) jenis yaitu sumpah pelengkap atau tambahan (*supletoir*), sumpah penentu atau pemutus (*decisoir*). Sumpah *supletoir* adalah suatu sumpah yang diberatkan oleh hakim atas pendakwa atau terdakwa guna menyempurnakan bahan-bahan bukti tersebut, ditambah dengan sumpah tersebut, memperoleh daya bukti cukup untuk dijadikan dasar putusan. Sedangkan sumpah *decisoir* adalah sumpah yang dibebankan atas permintaan salah satu pihak lawannya, dengan maksud untuk menyelesaikan perkara.

Dalam Hukum Acara Perdata Islam sumpah didasarkan kepada hadis Nabi saw riwayat Al-Baihaqi, sebagai berikut: *Bukti menjadi kewajiban penggugat dan sumpah menjadi kewajiban tergugat atau orang mengingkarinya*. Dan sumpah tersebut hendaknya didasarkan atas nama Allah SWT, sebagaimana sabda beliau: *Siapa yang bersumpah, maka bersumpahlah demi Allah, jika tidak demikian, maka tinggalkanlah* (Mardani, 2009:115).



Di dalam putusan Nomor : 1055/Pdt.G/2009/PA.Kra tidak terdapat jawaban dari pihak tergugat yang disebabkan ketidakhadirannya, maka pemeriksaan dilanjutkan pada tahap pembuktian. Untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat mengajukan bukti-bukti surat berupa:

- 1) Foto Copy Kutipan Akta Nikah (bukti P.1)
- 2) Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Penggugat (bukti P.2)
- 3) Surat Keterangan dari Kepala Desa Seloromo, Jenawi, Karanganyar (bukti P.3).

Kecuali bukti-bukti surat, penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai alat bukti. kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah sepanjang yang diketahui bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sedang goyah disebabkan karena tergugat pergi meninggalkan tergugat sejak sekitar 6 (enam) tahun lamanya dan tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah lagi kepada penggugat, bahkan saat ini tergugat tidak diketahui alamatnya.

Dalam kesimpulannya penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya dan mohon segera mendapatkan putusan.

d. Pertimbangan Hukum

Majelis Hakim Pengadilan Agama Karanganyar setelah memeriksa perkara tersebut secara seksama akhirnya memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

- 1) Berdasarkan foto copy kutipan akta nikah (bukti P.1) harus dinyatakan terbukti bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah. Dan harus dinyatakan terbukti pula setelah akad nikah tergugat mengucapkan *ta'klik talak*.



- 2) Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan tanpa alasan yang sah maka perkara ini diputus *verstek*.
- 3) Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya dengan saksi-saksi yang ternyata keterangannya satu dengan lainnya saling bersesuaian terutama tentang telah terjadi pisah tempat tinggal bersama selama kurang lebih 6 (enam) tahun dan selama berpisah tergugat tidak memberikan nafkah kepada penggugat dan bahkan saat ini tergugat tidak diketahui alamatnya.

Uraian alasan perceraian karena salah satu pihak pergi meninggalkan tempat kediaman tanpa diketahui alamatnya dalam kasus tersebut telah memenuhi alasan-alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 yaitu : salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya. Menurut Lili Rasyidi uraian alasan tersebut memuat beberapa syarat yang harus kita perhatikan sebagai alasan untuk bercerai yakni: meninggalkan yang lain harus dengan ijin pihak yang ditinggalkan. Selama dua tahun berturut-turut yang berarti bahwa kepergiannya tersebut harus penuh dua tahun lamanya dan selama itu belum pernah kembali. Tanpa sebab yang sah karena di luar kemampuannya (Lili Rasyidi, 1983:17).

- 4) Atas dasar pertimbangan tersebut majelis hakim berkesimpulan tergugat telah terbukti melanggar *Taklik Talak*, sehingga gugatan tersebut dikabulkan dengan menerapkan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam yaitu “suami melanggar taklik talak”.

e. Amar putusan

Berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Agama Karanganyar yang amarnya:

- 1) Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir.
- 2) Mengabulkan gugatan penggugat dengan *verstek*.
- 3) Menetapkan jatuh *Talak* satu *Khul'i* tergugat terhadap penggugat dengan *Iwald* Rp 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah)
- 4) Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 266.000,- (Dua Ratus Enam Puluh Enam ribu rupiah)

f. Analisis terhadap pertimbangan hukum

Tujuan perkawinan menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan adalah membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Menurut Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Indonesia, perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah*. Akan tetapi jika segala upaya telah diusahakan agar tercipta kehidupan rumah tangga yang demikian, tidak juga terwujud, maka perkawinan dapat berakhir atau putus karena perceraian.

Ketentuan perceraian dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 hanya disebutkan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Tidak dibedakan antara pihak suami atau pihak istri yang mengajukan perceraian. Sementara itu Kompilasi Hukum Islam membedakan antara perceraian karena talak dan perceraian berdasarkan gugatan perceraian. Perceraian karena talak diajukan oleh suami ke pengadilan agama, sedangkan gugatan perceraian diajukan oleh istri kepada suaminya.

Perceraian harus didasarkan pada alasan-alasan tertentu yang menunjukkan, bahwa antara suami istri itu tidak dapat hidup rukun kembali sebagai suami istri. Adapaun alasan-alasan yang dapat dijadikan

dasar untuk perceraian menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu:

- 1) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- 2) Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah karena hal lain di luar kemampuannya;
- 3) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara selama 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat selama perkawinan berlangsung;
- 4) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan kepada pihak yang lain;
- 5) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- 6) Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Dalam Kompilasi Hukum Islam selain menentukan persyaratan diatas masih ditambah dengan dua syarat yaitu (1) suami melanggar *taklik talak*, dan (2) peralihan agama atau *murtad* yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga. Dari sejumlah persyaratan tersebut, tidak ada kejelasan apakah persyaratan itu bersifat alternatif atau komulatif. Dikatakan bersifat alternatif, jika salah satu syarat terpenuhi sudah cukup untuk perceraian, sedangkan komulatif harus keseluruhan syarat terpenuhi.

Majelis hakim dalam perkara Nomor : 1055/Pdt.G/2009/PA.Kra memutuskan perceraian yang didasarkan pada pertimbangan hukum salah

satu pihak meninggalkan pihak lain selama 6 (enam) tahun dan selama itu tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin. Setelah dipanggil dengan sah dan patut menurut hukum sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yaitu dengan: Menempelkan surat gugatan penggugat/pemohon pada papan pengumuman di Pengadilan Agama dan mengumumkan melalui satu atau beberapa mass media. Pengumuman melalui mass media dilakukan sebanyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu 1 (satu) bulan antara pengumuman pertama dan kedua. Tenggang waktu mengenai relas panggilan terakhir dengan persidangan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan. Dan setelah panggilan tersebut ternyata pihak tergugat tidak hadir dan tidak mewakilkan orang lain sebagai kuasanya sedang ternyata tidak hadirnya tergugat tersebut bukan disebabkan oleh halangan yang sah.

Fakta-fakta yang menjadi alasan perceraian menurut majelis hakim telah terpenuhi. Majelis hakim selain memperoleh bukti tentang tergugat telah meninggalkan penggugat selama 6 (enam) tahun dan tidak memberikan nafkah lahir maupun batin, juga menemukan bukti-bukti lain yang menunjukkan bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk kehidupan rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* sudah tidak mungkin lagi dapat diwujudkan. Oleh karena itu permohonan Penggugat untuk perceraian dikabulkan oleh majelis hakim.

Temuan fakta, baik yang terungkap dipersidangan maupun yang terdapat dalam alat bukti berupa surat atau akta otentik yang menunjukkan bahwa latar belakang pendidikan penggugat selaku isteri berpendidikan rendah yaitu hanya sampai ke Sekolah Menengah Tingkat Pertama dan pekerjaannya sebagai pedagang, sehingga berpenghasilan tidak tetap. Sedangkan pekerjaan tergugat juga tidak tetap dan tidak jelas. Berarti faktor ekonomi yang ikut memicu ketidakharmonisan rumah tangga mereka.

Menurut penulis, pertimbangan majelis hakim yang paling penting adalah tentang ketidakhadiran tergugat selama tiga kali berturut-turut tanpa

adanya kejelasan dan alasan yang sah. Padahal telah dipanggil secara sahpatut dan patut selama tiga kali berturut-turut, sehingga cukup alasan bagi majelis hakim untuk memutuskan *verstek*. Dengan demikian, sudah terpenuhi faktor atau alasan terjadinya perceraian yaitu karena salah satu pihak pergi selama 6 (enam) tahun berturut-turut dan tidak memberikan nafkah kepada penggugat.

Ketentuan hukum acara yang akan mengatur tentang penegakan hukum Islam di Pengadilan Agama telah diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Undang-undang Nomor 50 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No.7 tentang Peradilan Agama. Selain itu, ketentuan dalam hukum acara perdata juga diberlakukan, karena berdasarkan Pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 ditentukan bahwa hukum acara yang berlaku pada pengadilan agama adalah hukum acara perdata dalam lingkungan peradilan umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam undang-undang ini.

Ketentuan tentang ketidakhadiran tergugat tanpa ada kejelasan dan alasan yang sah menurut hukum tidak diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Jo. Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, sedangkan HIR RBg mengaturnya dengan tegas yaitu pada Pasal 125 Ayat (1) HIR atau Pasal 149 Ayat (1) RBg yang menentukan apabila pada hari yang telah ditentukan, tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh wakilnya, padahal ia telah dipanggil dengan patut maka gugatan itu diterima dengan putusan tidak hadir (*verstek*), kecuali kalau ternyata bagi pengadilan negeri (baca: pengadilan agama) bahwa gugatan tersebut melawan hak atau tidak beralasan. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 54 Undang-Undang 7/1989 jo. Pasal 149 Ayat (1) RBg. hakim-hakim di pengadilan agama dapat menjatuhkan putusan secara *verstek*, asalkan tergugat telah dipanggil secara patut dan tidak hadir di muka sidang Pengadilan Agama. Hal ini juga berlaku terhadap majelis hakim yang memutus perkara ini, sebagaimana telah dikemukakan dalam pertimbangan hukumnya (Anonim. Jurnal Yudisial Vol-1/No.-02/Nonvember 2007)

**2. Hambatan Hakim Pengadilan Agama Karanganyar dalam menjatuhkan putusan perkara perceraian dengan alasan salah satu pihak pergi meninggalkan tempat kediaman tanpa diketahui alamatnya (*gaib*).**

Sebagaimana sudah diuraikan pada bagian terdahulu mengenai proses pemeriksaan perceraian, Pengadilan Agama Karanganyar telah melakukan proses pemeriksaan yang sesuai dengan apa yang telah ditentukan oleh hukum yang berlaku. Tetapi dalam jalannya proses pemeriksaan ini tetap saja ada “hambatan” yang mengganggu jalannya pemeriksaan.

Hal-hal itu bisa dikatakan sebagai hambatan maupun bukan hambatan. Dapat dikatakan bukan sebagai hambatan karena hal itu semua sudah diatur oleh hukum yang ada, jadi sudah diantisipasi dan dimasukkan dalam hukum acara yang ada atau sudah dimasukkan dalam tata cara proses pemeriksaan. Akan tetapi bisa juga dikatakan sebagai hambatan karena hal itu akan memperlambat dan mengulur waktu jalannya proses pemeriksaan.

Dalam proses pemeriksaan perkara perceraian yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Karanganyar ada beberapa hal yang sering menjadi hambatan bagi hakim dalam menjatuhkan putusan yaitu:

- a) Pemanggilan tergugat dalam perceraian yang diajukan dengan alasan salah satu pihak pergi meninggalkan tempat kediaman tanpa diketahui alamatnya (*gaib*).

Seperti dalam perkara perceraian diatas, tempat tinggal tergugat tidak diketahui. Sebagaimana sudah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jika ternyata tempat tinggal tergugat tidak jelas atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, maka panggilan ditempelkan pada papan pengumuman di Pengadilan Agama yang mengadili dan juga mengumumkan pada mass-media. Pengumuman melalui mass-media ini dilakukan dua kali dengan tenggang waktu satu bulan. Tenggang waktu antara panggilan terakhir dan permulaan sidang adalah 3 (tiga) bulan lamanya.

Hal ini berarti untuk tahap pemanggilan saja sudah menghabiskan waktu kurang lebih 5 (lima) bulan, dan sesudah itu baru dilakukan pemeriksaan (sidang pertama) atas perkara perceraian tersebut. Yang mana untuk proses pemeriksaan dilakukan selama kurang lebih 2 (dua) bulan, maka berarti secara keseluruhan menghabiskan waktu 7 (tujuh) bulan baru ada keputusan atas perkara perceraian tersebut.

Dari ketidakjelasan tempat tinggal tergugat tersebut telah banyak memakan waktu dalam pemeriksaan perkara perceraian sampai dengan jatuhnya putusan, karena pemeriksaan yang dapat diselesaikan selama 2 (dua) bulan menjadi 7 (tujuh) bulan. Penundaan pemeriksaan ini tentu saja merugikan pihak penggugat yang menginginkan segera adanya putusan dari Pengadilan Agama.

Selain dalam hal waktu yang lama dalam proses pemanggilan, hambatan dalam hal pemanggilan ini dirasakan tidak efektif karena pemanggilan tergugat hanya dilakukan dengan menempelkan berita pemanggilan di Pemanggilan Agama yang bersangkutan, padahal dimungkinkan tergugat diketahui tidak lagi berdomisili pada daerah setempat. Hambatan lain yaitu mengenai panggilan yang dilakukan melalui mass-media, padahal dalam pemanggilan perkara perceraian diatas hanya dilakukan dengan memanggil tergugat melalui mass-media lokal, sehingga dimungkinkan tergugat tidak mengetahui panggilan tersebut, karena bisa saja tergugat tengah berada di luar kota atau bahkan di luar negeri, sehingga panggilan tersebut tidak menjangkau keberadaan tergugat.

Akibatnya, dari ketidakhadiran tergugat ini hakim mengalami kesulitan dalam mencoba untuk mengupayakan damai atau merukunkan kembali kedua belah pihak, karena hakim hanya dapat merukunkan di muka persidangan sehingga jika salah satu pihak tidak hadir maka upaya damai itu tidak dapat dilakukan.

- b) Dalam hal pembuktian gugatan perceraian karena alasan salah satu pihak pergi meninggalkan tempat kediaman.



Hakim sering menggunakan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 sebagai pertimbangan utama dalam memeriksa perkara perceraian, selain karena hakim dalam bertindak harus berdasarkan hukum, juga agar tidak semua orang dengan mudah melakukan perceraian. Hakim harus memeriksa dengan teliti dan benar antara alasan yang diajukan sebagai dasar gugatan perceraian dengan kenyataan yang diperoleh dalam pembuktian.

Dalam perkara perceraian tersebut, Hakim mengalami kesulitan dalam hal membuktikan apakah benar-benar tergugat telah pergi tempat kediaman tanpa diketahui alamatnya sekarang, dalam hal ini biasanya hakim mendatangkan saksi untuk membuktikan alasan perceraian tersebut. Saksi yang dipanggil biasanya adalah orang tua penggugat dan tetangga penggugat. Di dalam proses pemeriksaan di persidangan untuk membuktikan hal tersebut maka harus benar-benar terbukti bahwa tergugat dalam perkara telah pergi selama 6 (enam) tahun dan tidak memberikan nafkah kepada tergugat. Dasar gugatan dalam perkara ini harus dapat dibuktikan tanpa adanya rekayasa dari penggugat dalam mengajukan gugatannya.

Untuk memperkuat keyakinan hakim, maka hakim harus memanggil orang tua tergugat untuk memberikan kesaksian, karena orang tua kemungkinan besar mengetahui persoalan rumah tangga anaknya. Akibatnya pemeriksaan akan berlangsung dengan banyak saksi yang kemudian akan menambah lagi waktu dalam proses pemeriksaan.

Lembaga pernikahan bukan hanya lembaga yang diatur oleh hukum, tetapi juga suatu ikatan yang sakral yang mana hukum dan hakim pun mengetahui hal itu. Jadi pihak suami istri tidak dapat seenaknya memutuskan ikatan perkawinan, dan dari praktek yang ada tidak sedikit pihak-pihak “nakal” dalam mengajukan gugatan perceraian.

Oleh karena itu, hakim dalam memeriksa perkara perceraian pun harus sangat teliti dan didasarkan pada aturan hukum yang ada. Pada prinsipnya jika alasan yang diajukan sudah sesuai dengan undang-undang



dan aturan hukum yang berlaku dapat dibuktikan didepan persidangan, maka gugatan perceraian itu dapat dikabulkan. Akan tetapi sebaliknya, jika alasan untuk bercerai tidak sesuai dengan undang-undang dan aturan hukum yang berlaku, ataupun sesuai tapi tidak dapat dibuktikan maka gugatan perceraian itu akan ditolak.



## BAB IV

### PENUTUP

#### SIMPULAN DAN SARAN

##### A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pertimbangan hakim terhadap putusan perkara perceraian nomor 1055/Pdt.G/2009/PA.Kra dengan alasan perceraian salah satu pihak pergi meninggalkan tempat kediaman tanpa diketahui alamatnya (*gaib*) telah memenuhi unsur perceraian yang terdapat dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975. Meskipun dalam implementasinya, dalam Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tidak memuat tentang pihak yang meninggalkan tempat kediaman tanpa diketahui alamatnya. Pengadilan dalam perkara perceraian ini memutus *verstek* karena ketidakhadiran tergugat. Setiap putusan *verstek* dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Karanganyar, selalu diperlukan proses pembuktian. Hal ini disamping untuk mengetahui dalil gugatannya juga untuk mengetahui apakah gugatan tersebut berdasarkan hukum dan berdasar hukum atau tidak. Apabila gugatan tersebut berdasarkan hukum dan beralasan, maka gugatannya dikabulkan dan apabila gugatannya tidak beralasan hukum, meskipun tergugat tidak pernah hadir dipersidangan gugatannya tetap ditolak.
2. Hambatan hakim Pengadilan Agama Karanganyar dalam memutus perkara perceraian dengan alasan salah satu pihak pergi meninggalkan tempat kediaman tanpa diketahui alamatnya adalah panggilan yang dilakukan melalui mass-media memerlukan waktu yang lama, dan kurang efektif karena pemanggilan perkara perceraian diatas hanya dilakukan dengan memanggil tergugat melalui mass-media lokal dan

menempelkan relaas panggilan di Pengadilan Agama Karanganyar, sehingga dimungkinkan tergugat tidak mengetahui panggilan tersebut, karena bisa saja tergugat tengah berada di luar kota atau bahkan di luar negeri, sehingga panggilan tersebut tidak menjangkau keberadaan tergugat.

## B. Saran

1. Perlu adanya upaya yang sungguh – sungguh dari pemerintah dan pengadilan untuk meningkatkan profesionalisme hakim dan insan peradilan pada umumnya dengan cara lebih mengefektifkan program pelatihan teknik yudisial yang diselenggarakan Mahkamah Agung agar setiap hakim mampu menjawab tantangan jaman yang dari hari ke hari permasalahan hukum dirasakan semakin ruwet dan kompleks.
2. Perlu ditingkatkan sistem informasi dan komunikasi yang canggih dan lebih modern dalam penyelenggaraan kegiatan operasional di Pengadilan Agama.
3. Perlu diadakan penyuluhan hukum yang terjadwal dan terencana agar masyarakat awam dapat mengerti akan hak dan kewajibannya dalam hidup berumah tangga, terutama hukum keluarga sekaligus mensosialisasikan Kompilasi Hukum Islam agar dapat terwujud menjadi hukum terapan dipengadilan agama.
4. Perlu dikaji ulang (diamandemen) sanksi pidana yang diatur dalam Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan peraturan organiknya dengan sanksi yang lebih berat agar pelanggaran terhadap hukum perkawinan dapat diminimalisir sehingga ketertiban dan keteraturan dalam perkawinan dapat pelan-pelan membuahkan hasil. Sanksi pidana yang lebih berat juga dimaksudkan agar masyarakat lebih menghormati perkawinan. Dan sebaiknya pengadilan Agama lebih selektif terhadap semua perkara perceraian yang diajukan

agar tidak terjadi kesalahan fatal didalam pengambilan keputusan, karena masyarakat saat ini cenderung mengabaikan kesakrakan perkawinan yang dapat dilihat dari data Pengadilan Agama Karanganyar bahwa persentase perkara yang lebih banyak diajukan adalah perkara perceraian.



## DAFTAR PUSTAKA

Abdul Manan. 2000. *Pokok-Pokok Hukum Perdata dan Kewenangan Peradilan*. Jakarta: Raja Gravindo Persada.

Abdurrahman dan Ridwan Syahrani. 1978. *Masalah-Masalah Hukum Perkawinan di Indonesia*. Bandung: Alumni.

Achmad Kuzari. 1995. *Nikah sebagai Perikatan*. Jakarta : PT Raja Gravindo Persada.

Ahmad Azhar Basyir. 2000. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Press.

Anonim. Jurnal Yudisial Vol-1/No.-02/November 2007

Bambang Sutiyoso. 2009. *Metode Penemuan hukum*. Yogyakarta: UII Perss

\_\_\_\_\_ dan Sri Hastuti Puspita Sari. 2005. *Aspek-aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*. Yogyakarta. UII Press.

Beni Ahmad Saebani. 2008. *Perkawinan Dalam Hukum Islam dan Undang-Undang (Perspektif Fiqh Munakahat dan UU No. 1/1974 tentang Poligami dan Problematikanya)*. Bandung : Pustaka Setia.

Buku Nikah yang diterbitkan Departemen Agama.

Chatib Rasyid dan Syaifuddin. 2009. *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktik*. Yogyakarta: UII Perss.

Djamil Latief. 1985. *Aneka Perceraian Di Indonesia*. Jakarta : Kencana.

Haji Abdullah Siddik. 1983. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta : Tirtamas

Herzien Indonesia Reglement (HIR)

<http://www.hg.org/divorce.html> (diakses tanggal 11 Agustus 2010 Pukul 12:15 WIB)

<http://family.jrank.org/pages/413/Divorce.html> (diakses tanggal 11 Agustus 2010 pukul 12:15 WIB)

Kompilasi Hukum Islam yang diterbitkan oleh Departemen Agama.

Johnny Ibrahim. 2006. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia

Lili Rasyidi. 1983. *Alasan-Alasan Perceraian Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. Bandung: Alumni.

Mardani. 2009. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah*. Jakarta: Sinar Grafika.

Moh Mahfud, Sidik Tono dan Dadan Muttaqien. 1993. *Pengadilan Agama dan Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*. Yogyakarta: UII Press.

Mohd. Idris Ramulya. 1996. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.

Muchlis Marwan dan Thoyib Mangkupranoto. 1992. *Hukum Islam II*. Surakarta : UNS Press.

Peter Mahmud Marzuki. 2006. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975 Tentang Perkawinan.

Riduan Syahrani, 1987. *Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil*. Jakarta: PT Media Sarana Press.

Sayyid Sabiq. 1980. *Fikih Sunnah Jilid 8*. Bandung : PT Alma'rif.

Slamet Abidin dan Aminudin. 1999. *Fiqh Munakahat*. Bandung : Pustaka Setia.

Soemiyati. 1983. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974*. Yogyakarta : Liberty.

Sudikno Mertokusumo. 2003. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Jogjakarta: Liberty.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Yahya Harahap. 2003. *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Sinar Grafika.

